



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2025

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

Jl. Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam 20514 Telo. (061)7951849

Email: dinkes@deliserdangkab.go.id Website: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun anggaran 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, khususnya Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sehat.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan, penyusunan LKIP ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun-tahun berikutnya sehingga kinerja Dinas Kesehatan dapat terus ditingkatkan secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang, sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.

Lubuk Pakam, 28 Februari 2026



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

Dr. Letti Rossanti Keliat, M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770418 200312 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	3
1.3. Isu Strategis Dinas Kesehatan	6
1.4. Sumber Daya Manusia Kesehatan.....	8
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	12
1.6. Landasan Hukum	16
1.7. Sistematika Laporan Kinerja	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis.....	20
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	23
2.3. Perjanjian Kinerja	29
2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1. Capaian Kinerja.....	40
3.2. Analisis Capaian Kinerja	44
3.3. Akuntabilitas Keuangan	98
3.4. Realisasi Anggaran.....	104
BAB IV PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2024-2025.....	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.....	22
Tabel 2.2	Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	25
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	31
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	34
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	42
Tabel 3.3	Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)	47
Tabel 3.4	Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	51
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian IKS Tahun 2024, Tahun 2025, dan Target pada Akhir Periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.....	59
Tabel 3.6	Kategori Predikat Nilai AKIP.....	67
Tabel 3.7	Hasil Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	68
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Nilai AKIP Tahun 2024, Tahun 2025, dan Target pada Akhir Periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.....	73
Tabel 3.9	Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat.....	85

Tabel 3.10	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	87
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian IKM Tahun 2024, Tahun 2025, dan Target pada Akhir Periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.....	93
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Per Program Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	99
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025	101
Tabel 3.14	Penilaian Efisiensi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	103
Tabel 3.15	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	5
Gambar 1.2	Jumlah Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Prioritas di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	10
Gambar 1.3	Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	15
Gambar 3.1	Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025.....	55
Gambar 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025.....	57
Gambar 3.3	Rapat Triwulan Monitoring dan Evaluasi Capaian IKS Bersama Kepala Dinas dan Puskesmas	61
Gambar 3.4	Rapat Rutin Pemegang Program PIS-PK Dinas dan Puskesmas Beserta Kepala Puskesmas Secara Daring	62
Gambar 3.5	Kunjungan Rumah Kepada Keluarga Sasaran	62
Gambar 3.6	Intervensi Lanjutan Hasil Identifikasi Kondisi Kesehatan Keluarga	63
Gambar 3.7	Keterlibatan Posyandu dalam Pelaksanaan PIS-PK.....	64
Gambar 3.8	Realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025.....	70
Gambar 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025.....	71
Gambar 3.10	Pertemuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.....	77
Gambar 3.11	Realisasi IKM Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025	89
Gambar 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025.....	91
Gambar 3.13	Tren Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025	102

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pertanggungjawaban atas hasil atau kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penerapan SAKIP pada perangkat daerah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah, untuk menyusun perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pelaksanaan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari implementasi SAKIP, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah



dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan kinerja tersebut mengacu pada pedoman teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman pada ketentuan, penyusunan LKIP diharapkan dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel sehingga mampu memberikan Gambaran yang jelas mengenai Tingkat pencapaian kinerja organisasi serta menjadi dasar dalam peningkatan kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026. Dokumen Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program pembangunan kesehatan yang menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Melalui penyusunan LKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selama Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan pada tahun-tahun berikutnya.

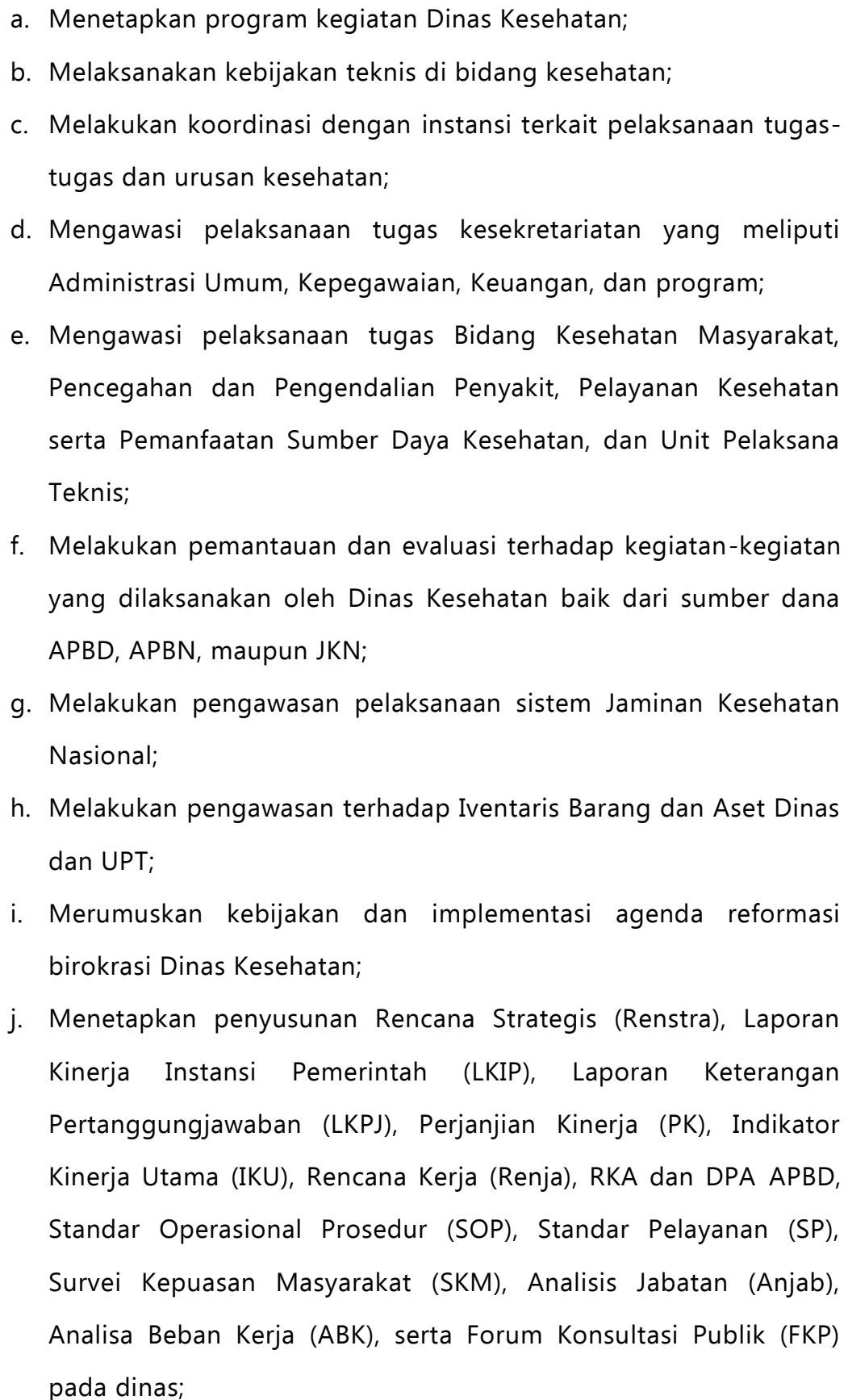
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diatur pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Kedudukan Dinas Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan Perangkat Daerah dengan Tipelogi A.

Tugas pokok Kepala Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

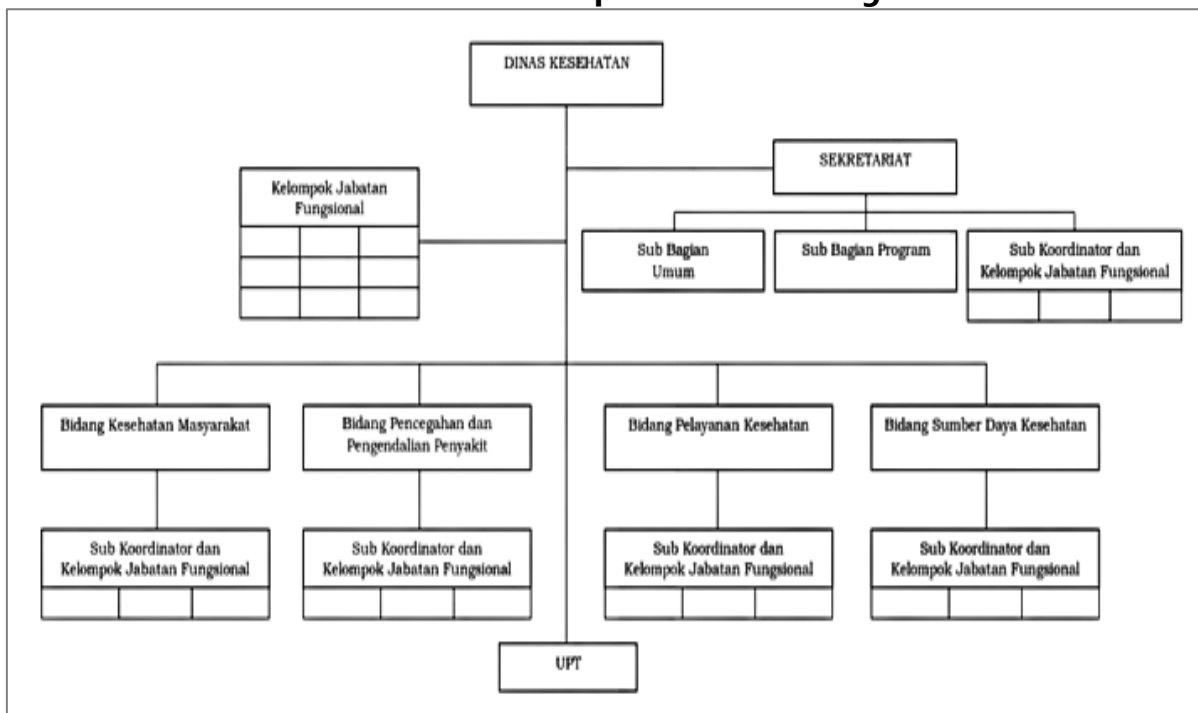
Tugas kepala Dinas Kesehatan dalam Perbup tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 
- a. Menetapkan program kegiatan Dinas Kesehatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas dan urusan kesehatan;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan program;
 - e. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan, dan Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baik dari sumber dana APBD, APBN, maupun JKN;
 - g. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Dinas dan UPT;
 - i. Merumuskan kebijakan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Kesehatan;
 - j. Menetapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) pada dinas;

- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Struktur organisasi Dinas Kesehatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang



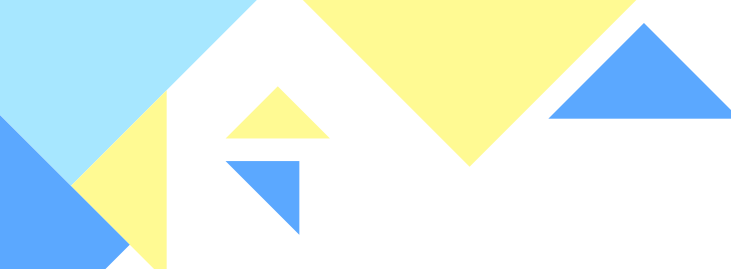
Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

1.3. Isu Strategis Dinas Kesehatan

Permasalahan utama atau *strategic issued* pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang masih didominasi oleh permasalahan stunting, penyakit degeneratif dan penyakit menular, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, serta kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang menggambarkan kondisi kesehatan keluarga berdasarkan pemenuhan indikator pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga.

Permasalahan stunting berkaitan dengan indikator keluarga sehat seperti pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif, serta pemantauan status gizi keluarga. Sementara itu, meningkatnya penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes serta masih ditemukannya penyakit menular tercermin dalam indikator pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular pada keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga yang belum sepenuhnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta belum optimal memanfaatkan pelayanan kesehatan.

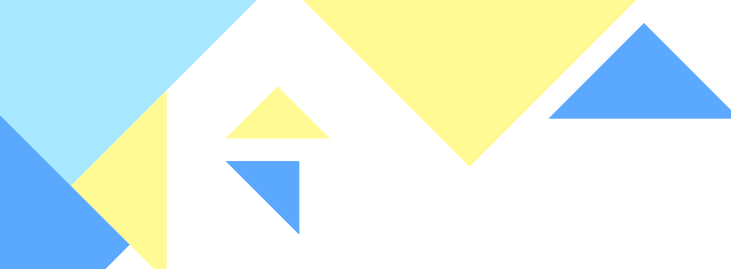
Selain itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan juga berpengaruh terhadap peningkatan nilai IKS, karena sebagian besar indikator pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan ibu



hamil, bayi, balita, usia produktif, dan lanjut usia merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan yang juga menjadi indikator keluarga sehat. Oleh karena itu, optimalisasi pencapaian SPM akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah keluarga sehat di masyarakat.

Di sisi lain, kepesertaan jaminan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan. Ketersediaan jaminan kesehatan akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sehingga dapat meningkatkan status kesehatan keluarga yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKS.

Sejalan dengan kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional oleh Kementerian Kesehatan, pendekatan Indeks Keluarga Sehat saat ini juga telah menjadi bagian dari penguatan transformasi Layanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*) yang menekankan pada pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif melalui pendekatan siklus hidup dan berbasis keluarga. Dalam kerangka tersebut, pendekatan keluarga yang sebelumnya diukur melalui IKS menjadi salah satu dasar dalam penguatan layanan kesehatan primer untuk meningkatkan akses, mutu, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.




Dengan demikian, penguatan pendekatan keluarga dalam kerangka Layanan Kesehatan Primer menjadi strategi penting dalam mengatasi permasalahan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan capaian SPM, serta perluasan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.

1.4. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah, jenis, maupun kompetensi sangat menentukan kualitas dan keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks.

Sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang tersebar pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah seperti puskesmas dan jaringannya. Tenaga kesehatan tersebut meliputi berbagai profesi seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga sanitasi lingkungan,



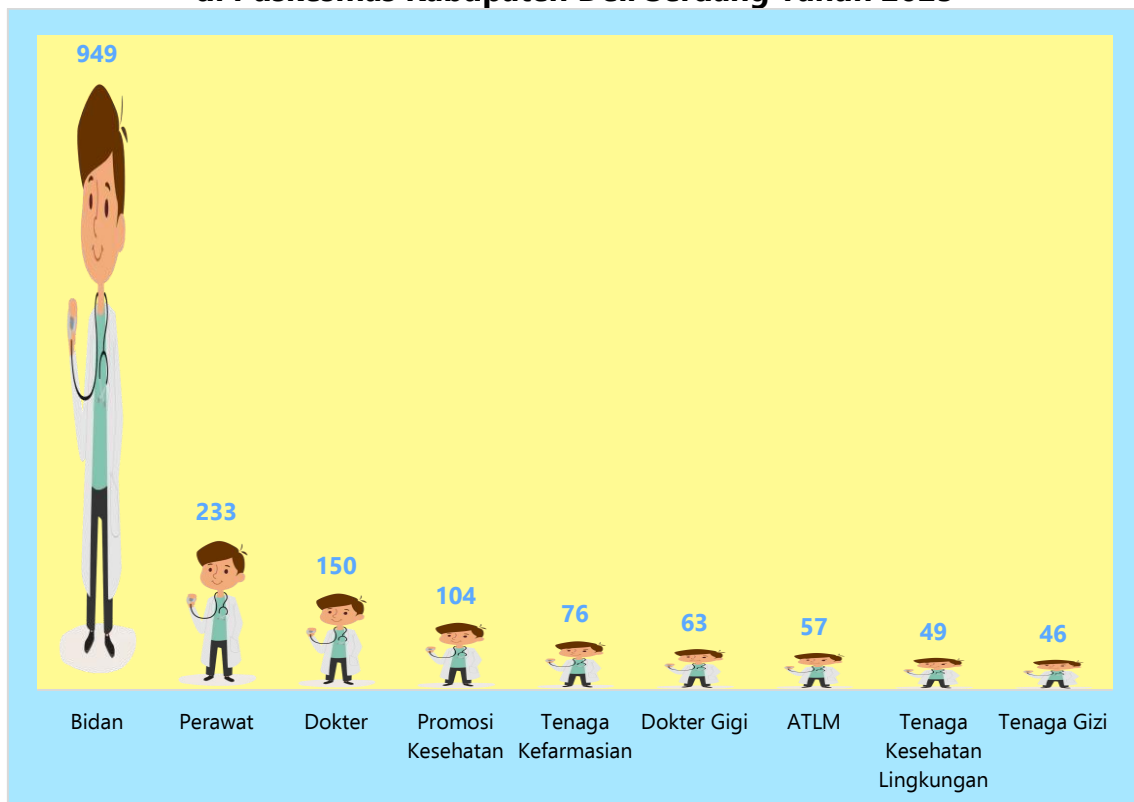
tenaga kefarmasian, serta tenaga kesehatan lainnya yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kesehatan di tingkat daerah pada dasarnya dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada paling dekat dengan masyarakat, yaitu puskesmas. Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya juga menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, setiap output program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan pada dasarnya bersumber dari data yang dihimpun oleh puskesmas beserta jaringannya.

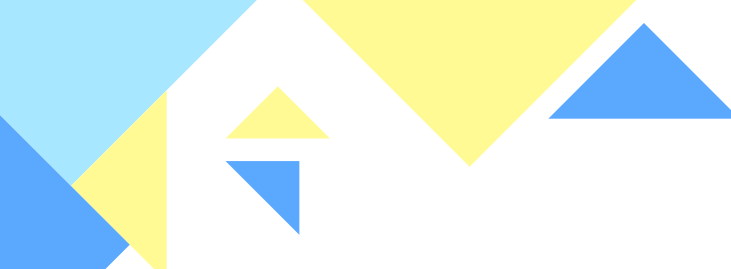
Fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di puskesmas. Oleh karena itu, pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sangat bergantung pada kinerja para tenaga kesehatan yang berada di puskesmas. Namun demikian, jumlah dan jenis SDM di puskesmas masih terbatas sehingga dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dasar diprioritaskan ketersediaan sembilan jenis tenaga kesehatan strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pemerintah menetapkan pemenuhan sembilan jenis tenaga kesehatan strategis yang menjadi prioritas dalam penyediaan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kesembilan jenis tenaga kesehatan tersebut terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan tenaga teknologi laboratorium medis. Jumlah sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas yang tersedia di seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan Prioritas
di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025



Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2026



Jumlah sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas yang bertugas di 34 Puskesmas di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 adalah sebanyak 1.727 orang. Jenis tenaga kesehatan paling banyak di Puskesmas adalah bidan sebanyak 949 Orang (54,95%) dan paling sedikit adalah tenaga gizi sebanyak 46 Orang (2,66%). Untuk menjamin kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas, setiap tahun Puskesmas melakukan perhitungan kebutuhan ideal terkait jumlah dan jenjang jabatan dari masing-masing jenis tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan melalui metode Analisis Beban Kerja (ABK).

Perhitungan ABK dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain jumlah layanan yang diberikan; rasio terhadap jumlah penduduk beserta persebarannya; luas serta karakteristik wilayah kerja; ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah tersebut; serta pembagian waktu kerja yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, standar ketenagaan Puskesmas juga dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah, yaitu Puskesmas di kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil. Standar ketenagaan ini merupakan batas minimal yang perlu dipenuhi agar penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas dapat berjalan secara optimal. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan, pelaksanaan pendataan, intervensi, serta pembinaan keluarga sehat dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKS di wilayah kerja.


1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Selain sumber daya manusia kesehatan, dukungan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu faktor penunjang utama dalam upaya mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang kondisi per Desember 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2024-2025


No	Sarana	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Puskesmas	34	34
2	UPT. Rumah Sakit	2	2
3	Puskesmas Pembantu	109	109
4	Pos Kesehatan Desa	159	159
5	Puskesmas Keliling Roda Empat	33	33
6	Patroli Kesehatan Roda 2	379	379
7	Mobil Ambulance	36	36
8	Mobil Promosi Kesehatan	1	1
9	Mobil Distribusi Obat	2	2
10	Mesin Fogging	39	34
11	Mobil Pelayanan X-RAY TBC	0	1

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2026



Jumlah Puskesmas yang tersedia di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 34 unit. Berdasarkan kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanannya, Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 18 Puskesmas rawat inap dan 16 Puskesmas non rawat inap. Penetapan klasifikasi tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 504 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 590 Tahun 2019 mengenai Penetapan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap, Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Non PONED, serta Puskesmas Pembantu yang merupakan bagian dari jaringan pelayanan Puskesmas di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Selain memastikan ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Kesehatan juga berupaya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan Puskesmas tersebut salah satunya tercermin melalui status akreditasi yang dimiliki oleh masing-masing Puskesmas. Akreditasi diharapkan dapat mendorong peningkatan sistem tata kelola dan manajemen Puskesmas agar lebih efektif dan terstandar. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan survei re-akreditasi terhadap 33 Puskesmas. Sementara itu, Puskesmas Sialang yang menggantikan Puskesmas Bangun Purba baru menjalani proses akreditasi pada tahun 2024. Berdasarkan hasil survei akreditasi yang telah dilakukan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tahun



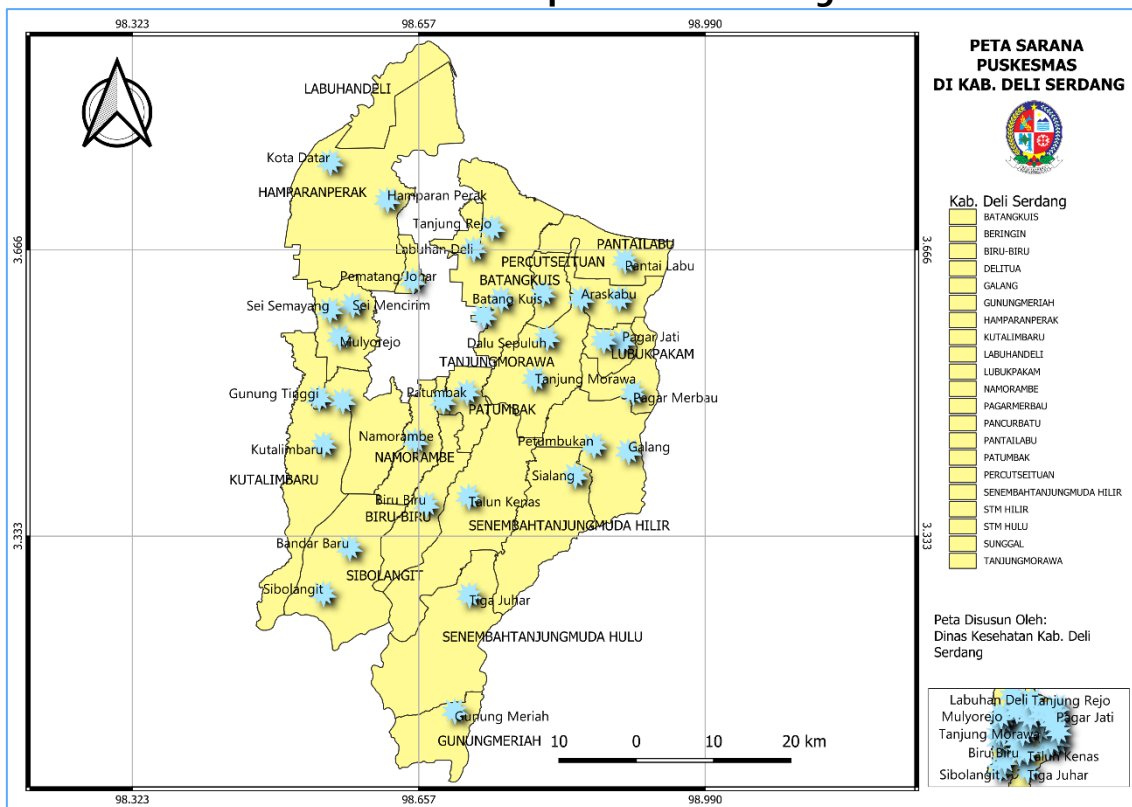
2023-2024, maka diperoleh status akreditasi Puskesmas yaitu Paripurna sebanyak 33 Puskesmas (97,06%) dan status akreditasi Utama sebanyak satu Puskesmas (2,94%) yaitu Puskesmas Gunung Meriah.

Selain aspek jumlah dan mutu pelayanan, distribusi atau sebaran Puskesmas di setiap wilayah juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, serta kebutuhan pelayanan kesehatan di masing-masing kecamatan. Dengan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang merata, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan tepat waktu. Keberadaan Puskesmas di setiap wilayah kerja juga berperan penting dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, sehingga dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sebaran Puskesmas yang merata juga berperan penting dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS). Melalui keberadaan Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah, pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dapat dilakukan secara lebih optimal, mulai dari pendataan keluarga, pemantauan kondisi kesehatan, hingga

pelaksanaan intervensi terhadap permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar menjadi lebih mudah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan status kesehatan keluarga dan mendorong tercapainya target IKS di Kabupaten Deli Serdang. Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.3
Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025



Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Puskesmas yang dibangun sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Puskesmas tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah minimal satu Puskesmas per

kecamatan dan paling banyak terdapat tiga Puskesmas dalam satu Kecamatan, seperti Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal. Adapun kapasitas tempat tidur pasien di seluruh Puskesmas dilaporkan sebanyak 386 unit.

1.6. Landasan Hukum

Laporan kinerja Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

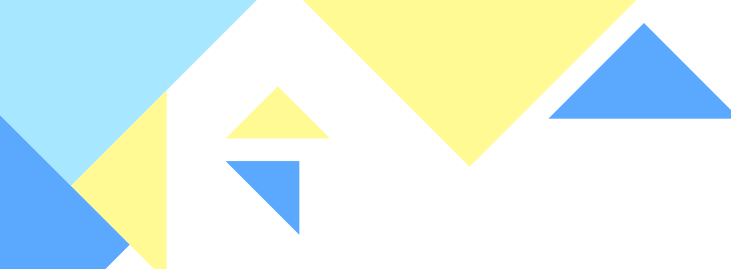
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tamabahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- g. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang; dan
- h. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Sistematika penulisan laporan ini disusun agar memudahkan dalam memahami isi laporan serta memberikan informasi yang komprehensif mengenai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 terdiri dari beberapa bab



sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


Memuat gambaran umum mengenai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang meliputi tugas dan fungsi, struktur organisasi, kondisi sumber daya yang dimiliki, isu strategis pembangunan kesehatan, serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi penjelasan mengenai perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025–2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat uraian mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selama Tahun 2025, yang meliputi analisis pencapaian indikator kinerja, evaluasi terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam



pelaksanaan program dan kegiatan, serta analisis penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selama Tahun 2025 serta rekomendasi atau langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja pembangunan kesehatan untuk periode tertentu. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang, kondisi sumber daya yang tersedia, serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.

Melalui Renstra tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai



selama periode perencanaan. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur sebagai dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Indikator kinerja tersebut menjadi instrumen penting dalam sistem pengukuran kinerja yang digunakan untuk memantau capaian kinerja secara berkala, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil kinerja yang dicapai dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026, telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang terukur disertai dengan target capaian kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan. Penetapan indikator dan target kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan serta sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

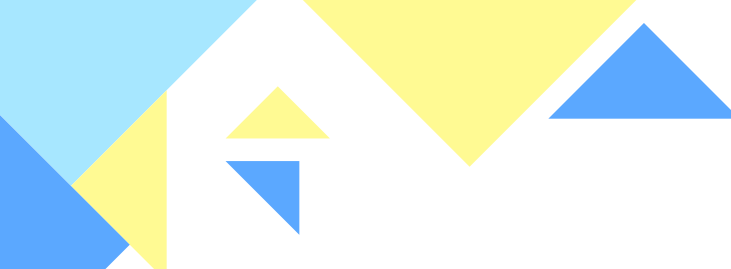
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
				2025	2026
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,55 Poin	0,60 Poin
2	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,70 Nilai	82,90
3	Meningkatkan pelayanan prima pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,70 Poin	84,80 Poin

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang 2025-2026

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian ketiga sasaran di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menetapkan indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Salah satu indikator yang digunakan adalah **Indeks Keluarga Sehat (IKS)** yang menggambarkan tingkat kemandirian keluarga dalam menjaga dan meningkatkan status kesehatannya. Indikator ini juga sejalan dengan pendekatan pelayanan kesehatan berbasis keluarga yang menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.

Selain indikator yang berkaitan langsung dengan pembangunan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga

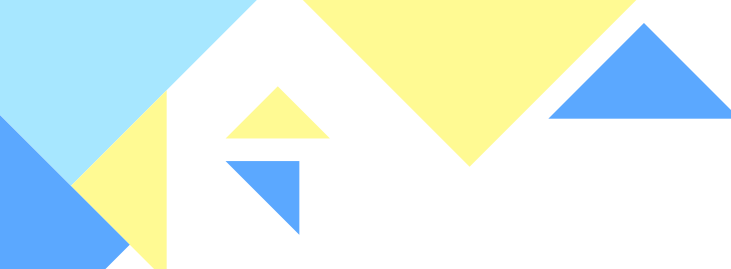


menetapkan indikator yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan mutu pelayanan publik, antara lain **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap pelayanan kesehatan. Indikator-indikator tersebut mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya penetapan indikator dan target kinerja tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing sebagai alat ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi. Penetapan indikator tersebut bertujuan untuk mendukung proses pengukuran kinerja secara terarah sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah.



IKU dipilih dari indikator-indikator yang paling merepresentasikan hasil utama pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga menjadi fokus utama dalam pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, pemilihan IKU harus mempertimbangkan Tingkat relevansi, keterukuran, serta kemampuan indikator tersebut dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dalam kerangka SAKIP, IKU juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kinerja secara berkala. Melalui indikator tersebut, capaian kinerja organisasi dapat diukur secara objektif sehingga memudahkan dalam menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, IKU juga menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja serta penilaian keberhasilan kinerja kepala perangkat daerah secara individu.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan indikator yang secara langsung menggambarkan capaian sasaran strategis. Oleh karena itu, indikator yang dipilih sebagai IKU pada dasarnya merupakan indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan yang

memiliki peran paling penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. Selain itu, IKU yang ditetapkan juga berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai, sehingga mampu menggambarkan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Formulasi Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Alasan	Formulasi
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	Merupakan salah satu program dari Agenda kelima Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan	[(Jumlah keluarga dengan IKS>0,80)/ (Jumlah keluarga yang didata di kabupaten)]
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat	[(Total dari nilai persepsi per unsur/ Total unsur yang terisi) x Nilai penimbang]

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Alasan	Formulasi
		Nilai AKIP	Poin	Merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Nilai Hasil Evaluasi (dengan skor tertinggi 100) didapatkan setelah dilakukan penilaian terhadap bobot komponen: Perencanaan Kinerja (30) Pengukuran Kinerja (30) Pelaporan Kinerja (15) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)

Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

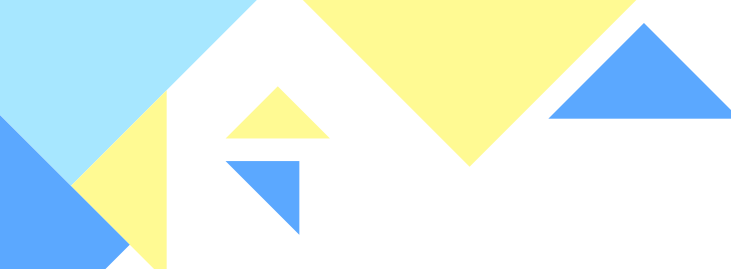
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor 0095 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025. IKU yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari tiga indikator yang sesuai dengan indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026. Namun untuk target IKU kedua, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah tercapai melebihi target yang

ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 sehingga dalam SK IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025, target untuk IKM disesuaikan kembali sesuai capaian pada akhir tahun 2024. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD (2023)	Target IKU pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026	Capaian Tahun 2024	Target IKU pada SK IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,44 Poin	0,55 Poin	0,47 Poin	0,55 Poin
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,34 Nilai	82,70 Nilai	82,53 Nilai	82,70 Nilai
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50 Poin	84,70 Poin	88,64 Poin	88,65 Poin

Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah disusun selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Rencana Strategis perangkat daerah yang berlaku. Pemilihan dan penetapan IKU Dinas Kesehatan juga telah disusun dengan mempertimbangkan bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lain Dinas Kesehatan; kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; kebutuhan data statistik pemerintah; dan kelaziman dan perkembangan pada bidang kesehatan.


Keselarasan tersebut memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, dan ukuran keberhasilan kinerja organisasi tetap konsisten dengan perencanaan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian pada target kinerja tahunan dengan mempertimbangkan capaian kinerja aktual yang diperoleh dari hasil evaluasi pada tahun sebelumnya.

Target kinerja yang tercantum dalam dokumen IKU selanjutnya juga disesuaikan ke dalam Perjanjian Kinerja tahunan sebagai bentuk komitmen kinerja organisasi pada tahun berjalan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 tetap relevan dengan kondisi capaian kinerja aktual pada tahun 2024 serta diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja Dinas Kesehatan secara berkelanjutan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja tahunan antara pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah yang berisi indikator kinerja beserta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus dasar dalam melakukan pengukuran serta evaluasi kinerja organisasi pada periode pelaporan. Melalui Perjanjian Kinerja, arah pelaksanaan kegiatan dapat difokuskan pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan capaian kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi pada tahun sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana pada saat penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025–2026 yang difinalkan pada tanggal 31 Januari 2024, kondisi awal indikator IKM yang digunakan sebagai baseline adalah capaian tahun 2023 yaitu sebesar 82,34 poin. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada akhir Tahun 2024, capaian IKM menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai 88,64 poin. Sehubungan dengan perkembangan capaian tersebut, maka target indikator IKM pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disesuaikan menjadi sebesar 88,65 poin.



Penyesuaian target tersebut dilakukan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tidak hanya selaras dengan arah sasaran strategis yang telah ditetapkan, tetapi juga mencerminkan upaya peningkatan kinerja yang lebih terukur.

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yang ditetapkan pada bulan Januari 2025 dan sehubungan dengan adanya perubahan dokumen anggaran, maka perjanjian kinerja kembali ditandatangani oleh pelaksana tugas kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada bulan Oktober 2025. Anggaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja kepala Dinas Kesehatan pada awal tahun anggaran yaitu sebesar Rp. 649.287.417.365,00 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran tersebut kemudian berubah sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yaitu sebesar Rp. 704.478.173.255,00

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 memuat indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025. Indikator dan target kinerja tidak mengalami perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang ditandatangani pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi acuan dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel

berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,55 Poin
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,70 Nilai
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,65 Poin
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	381.673.862.937	APBD, JKN KAPITASI DAN NON KAPITASI, TARIF PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	318.763.020.468	APBD, APBN
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.777.678.950	APBD, APBN
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	486.094.000	APBD, APBN
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	777.516.900	APBD, APBN


Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun 2025

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Strategis perangkat daerah serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Melalui rencana kerja dan anggaran tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 juga mempertimbangkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, keterkaitan antara perencanaan kinerja dan penganggaran dapat terjaga secara konsisten dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Selain itu, rencana kerja dan anggaran yang disusun juga memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat serta berbagai isu strategis



pembangunan kesehatan yang dihadapi di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan perencanaan yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran, diharapkan pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam hal mencapai sasaran strategis, Dinas Kesehatan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Rencana Kerja Anggaran dalam dokumen LKIP ini merupakan gabungan anggaran dari masing-masing sub unit tersebut. Anggaran per program yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan, 34 Puskesmas, RSUD Pancur Batu, dan RSUD Bangun Purba Tahun 2025.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperkuat penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Alokasi anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai intervensi kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Adapun rincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.467.952
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.750.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.771.983.433
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	477.470.232
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.966.829.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.736.000
		Peningkatan Pelayanan BLUD	83.821.076.438
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

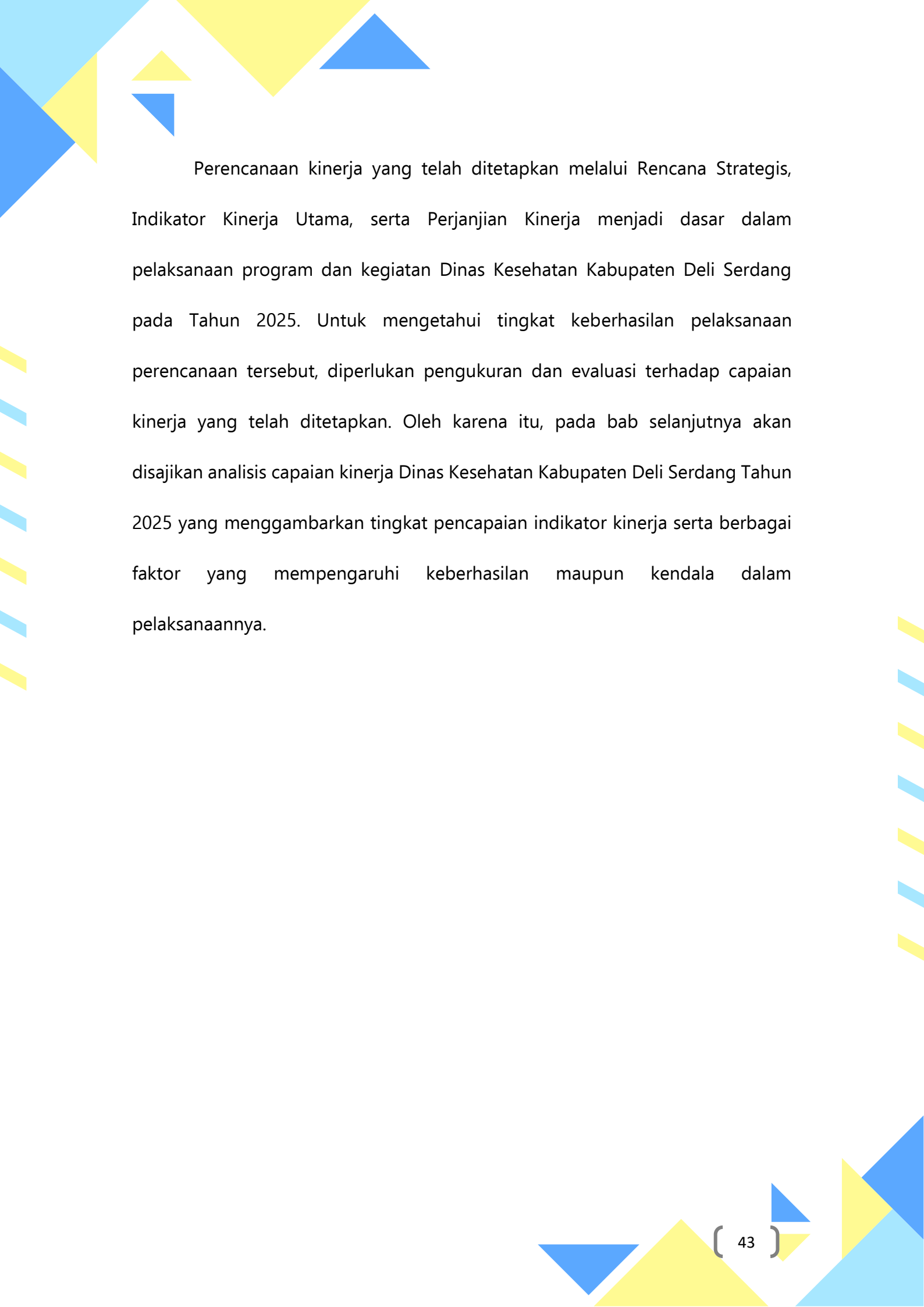
No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	237.037.482.565
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	767.881.619
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	819.417.912
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	93.152.950
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.684.526.000

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	102.113.000
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	218.697.000
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	165.284.000
5	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.092.000

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	339.992.900
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	385.432.000

Sumber: DPPA Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2025

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun Anggaran 2025 mencakup empat program pelayanan dan satu program penunjang, dengan total anggaran sebesar Rp. 704.478.173.255,00. Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, yang terdapat dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebesar Rp. 381.673.862.937,00 atau 54,18% dari total anggaran. Untuk urusan kesehatan, alokasi terbesar terdapat dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, mencapai Rp.318.763.020.468,00 atau 45,25% dari total anggaran. Sementara itu, alokasi terkecil berada di Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dengan jumlah Rp.486.094.000 atau 0,07% dari total anggaran Dinas Kesehatan.



Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, serta Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2025. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan tersebut, diperlukan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya akan disajikan analisis capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yang menggambarkan tingkat pencapaian indikator kinerja serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan serta menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui proses pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, baik yang bersifat pendukung maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Mengikutsertakan masyarakat dalam evaluasi kinerja dapat memperkuat transparansi publik dan mendorong Dinas Kesehatan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dokumen LKIP ini nantinya dapat diakses publik melalui situs web Dinas Kesehatan sehingga informasi dapat diperoleh masyarakat lebih mudah terutama mengenai kinerja dan pencapaian program.

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selama Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang berhasil dicapai pada akhir periode pelaporan. Proses pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, baik yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama maupun indikator kinerja lainnya yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Hasil pengukuran tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya, capaian kinerja tersebut dianalisis dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi, tingkat keberhasilan pencapaian indikator, serta berbagai faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai sekaligus mengetahui berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, hasil pengukuran capaian indikator selanjutnya diklasifikasikan ke dalam skala ordinal nilai peringkat kinerja. Skala ordinal ini digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengelompokan tersebut, capaian kinerja dapat diinterpretasikan secara lebih sistematis sehingga memudahkan dalam melakukan analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Penggunaan skala ordinal nilai peringkat kinerja juga bertujuan untuk memberikan standar penilaian yang konsisten dalam mengevaluasi capaian indikator kinerja. Sehingga capaian kinerja tidak hanya dilihat dari besaran angka realisasi, tetapi juga dari kategori tingkat keberhasilan yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja organisasi. Kategori skala ordinal nilai peringkat kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat dilihat melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang berhasil dicapai pada akhir tahun pelaporan. Adapun rincian capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
<u>Sasaran 1: Meningkatnya Keluarga Sehat</u>					
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,55 Poin	0,60 Poin	109,09	Sangat Tinggi
<u>Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</u>					
2	Nilai AKIP	82,70 Nilai	83,44 Nilai	100,89	Sangat Tinggi
<u>Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah</u>					
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,65 Poin	88,92 Poin	100,30	Sangat Tinggi

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sekretariat Dinkes Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2026

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS), yang berfungsi sebagai indikator untuk mendukung tercapainya sasaran peningkatan keluarga sehat pada tahun 2025, telah terealisasi sebesar 0,60 poin dari target 0,55 poin, dengan capaian kinerja mencapai 109,09% (Kategori Sangat Tinggi).



Indikator Nilai AKIP, yang berfungsi sebagai indikator untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya akubtabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun 2025, telah terealisasi sebesar 83,44 Nilai dari target 82,7 Nilai, dengan capaian kinerja mencapai 100,89% (Kategori Sangat Tinggi). Kemudian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang berfungsi sebagai indikator untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah pada tahun 2025, telah terealisasi sebesar 88,92 poin dari target 88,65 poin, dengan capaian kinerja mencapai 100,30% (Kategori Sangat Tinggi).

Capaian kinerja yang telah disajikan di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2025. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hasil yang dicapai, selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing sasaran strategis guna melihat tingkat keberhasilan pencapaiannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:


Sasaran 1

Meningkatnya Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) digunakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatkan Keluarga Sehat. Pada tahun 2025, Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang terealisasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 0,60 Poin. Dengan perbandingan realisasi dan target, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Meningkatkan Keluarga Sehat berada pada angka 109,09%.

Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) diperoleh melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Melalui pendekatan ini, Puskesmas mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan dengan memperluas jangkauan sasaran serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan




di wilayah kerjanya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pelayanan luar gedung dengan keluarga sebagai sasaran utama intervensi kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan diarahkan dan dimotivasi untuk memanfaatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) maupun pelayanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas. Selain itu, keluarga juga didorong untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menjaga kesehatan lingkungan serta mengendalikan berbagai faktor risiko yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Proses tersebut dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan oleh kader kesehatan maupun petugas Puskesmas sehingga keluarga diharapkan mampu berperan aktif dalam upaya menjaga dan meningkatkan status kesehatan secara mandiri.

Melalui proses pemberdayaan keluarga, diperoleh data mengenai kondisi kesehatan keluarga yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan nilai Indeks Keluarga Sehat. Data tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian keluarga dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Untuk menentukan apakah suatu keluarga tergolong dalam kategori sehat atau tidak sehat, diperlukan sejumlah indikator yang digunakan sebagai penanda dalam menilai kondisi kesehatan keluarga tersebut.

Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, pemanfaatan pelayanan kesehatan, serta kondisi



lingkungan keluarga. Hasil penilaian terhadap indikator tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi status kesehatan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, pengukuran Indeks Keluarga Sehat dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesehatan keluarga di suatu wilayah. Pengukuran Indeks Keluarga Sehat didasarkan pada 12 indikator sebagai berikut:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita Tuberkulosis (TB) paru mendapatkan pengobatan standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga memiliki akses jamban sehat;

Berdasarkan kedua belas indikator tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada setiap keluarga sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan keluarga. Dalam pelaksanaannya, pendekatan keluarga dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang diterapkan pada tingkat keluarga untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan secara komprehensif. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung oleh forum

komunikasi yang dikembangkan sebagai sarana interaksi antara petugas kesehatan dengan keluarga sasaran. Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat melalui peran kader kesehatan sebagai mitra Puskesmas dalam pelaksanaan pendataan dan pembinaan keluarga.

Instrumen penilaian yang digunakan memuat indikator-indikator yang selanjutnya dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)

No	Indikator	Nominator	Denominator
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun), suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun)
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik, praktik mandiri bidan)	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan)
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Keluarga dengan bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 1, Polio 3, Polio 4, dan Campak	Keluarga terdapat bayi usia 12-23 bulan

No	Indikator	Nominator	Denominator
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	Keluarga dengan bayi usia 7–23 bulan dan bayi tersebut selama 0-5 bulan 29 hari hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif)	Keluarga dengan bayi usia 7-23 bulan
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari)
6	Penderita TB paru mendapatkan pengobatan standar	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir dan penderita tersebut berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan, tidak melewatkan minum obat satu kalipun	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi)
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis) dan berobat teratur minimal 1 bulan terakhir sampai dilakukannya	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia

No	Indikator	Nominator	Denominator
		kunjungan keluarga, dan penderita tersebut tidak dipasung dan atau ditelantarkan	atau psikosis)
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	Keluarga yang semua anggota keluarganya tidak ada yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok	Keluarga
10	Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Keluarga yang seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, atau kartu lainnya seperti: Jamkesmas, ASKES, ASABRI, Jamkesda, dan Jamsostek, tidak termasuk asuransi swasta	Keluarga
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	Keluarga yang memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari	Keluarga
12	Keluarga memiliki akses jamban sehat	Keluarga yang tersedia/memiliki jamban sehat berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan dan setiap anggota keluarga menggunakannya	Keluarga

Sumber: Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan rumus di atas, maka diperoleh persentase dari masing-masing indikator. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga juga dapat ditentukan dengan formulasi:

$$IKS = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{12 - \text{Jumlah N}}$$

Contoh, jika suatu keluarga terdapat semua indikator (12), dan yang memenuhi syarat (dijawab dengan "Ya") ada 10 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $10/12=0,83$. Jika di suatu keluarga lain terdapat hanya 10 indikator dan yang memenuhi syarat hanya 6 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $6/10=0,6$. Rekapitulasi IKS keluarga kemudian digunakan untuk menghitung/menetapkan IKS suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten) yang menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut menggunakan formulasi:

$$IKS \text{ wilayah} = \frac{\text{Jumlah keluarga dengan IKS} > 0,800}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$$

Pengkategorian keluarga berdasarkan Indeks Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

- IKS < 0,500 = Keluarga tidak sehat
- IKS 0,500-0,800 = Keluarga pra sehat
- IKS > 0,800 = Keluarga sehat

Penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dilakukan melalui pemanfaatan Aplikasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Aplikasi tersebut digunakan sebagai sarana pengolahan dan rekapitulasi data hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh Puskesmas. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui aplikasi tersebut, capaian IKS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 menurut masing-masing indikator dapat disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.4
Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Indikator	$\frac{\sum \text{Keluarga bernilai Y}}{\sum \text{Keluarga} - \sum \text{keluarga bernilai N}}$	Capaian
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	144.121	76,28%
		189.488	
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	10.693	96,41%
		11.091	
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	12.032	98,71%
		12.189	
4	Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan	12.608	79,54%
		15.851	
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	63.743	94,94%
		67.138	
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan standar	13.726	56,03%
		24.490	

No	Indikator	$\frac{\sum \text{Keluarga bernilai Y}}{\sum \text{Keluarga} - \sum \text{keluarga bernilai N}}$	Capaian
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	38.197	58,28%
		65.546	
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	3.708	57,72%
		6.424	
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	289.592	63,27%
		457.676	
10	Keluarga mempunyai akses/memiliki sarana air bersih	453.633	99,13%
		457.627	
11	Keluarga memiliki akses/ menggunakan jamban sehat	448.320	97,99%
		457.530	
12	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	321.884	70,34%
		457.618	
\sum keluarga dengan IKS > 0,8			316.226
Indeks Keluarga Sehat (IKS)			0,6

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

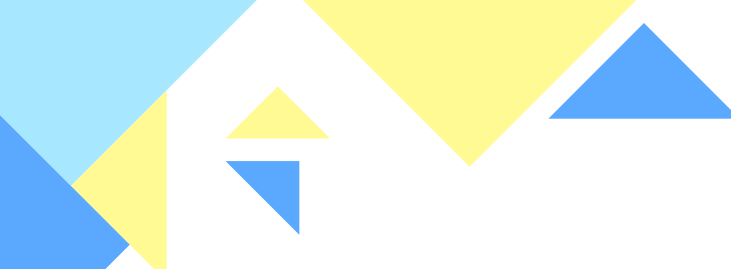
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 12 indikator penyusun IKS, indikator yang dicapai paling tinggi yaitu Keluarga mempunyai akses sarana air bersih sebesar 99,13% dari 457.627 keluarga. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan yaitu sebesar 57,72% dari 6.424 keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis).



Berdasarkan hasil penghitungan data agregat di atas, maka didapat nilai Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 adalah sebesar 0,6 Poin atau masih berada pada kategori Keluarga Tidak Sehat.

Analisis capaian Indeks Keluarga Sehat juga dilakukan berdasarkan wilayah kerja Puskesmas untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi kesehatan keluarga di Kabupaten Deli Serdang. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat variasi capaian IKS antar Puskesmas yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, cakupan pendataan keluarga, serta pelaksanaan intervensi program kesehatan di masing-masing wilayah kerja. Perbedaan capaian tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan implementasi pendekatan keluarga yang dilakukan oleh Puskesmas dalam menjangkau dan membina keluarga sasaran.

Puskesmas dengan capaian IKS yang relatif lebih tinggi umumnya didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga yang lebih optimal, keterlibatan kader kesehatan yang aktif, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat yang cukup baik. Sebaliknya, pada beberapa wilayah kerja Puskesmas dengan capaian yang masih relatif rendah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain cakupan pendataan keluarga yang belum merata, keterbatasan sumber daya pelaksana di lapangan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan secara rutin.



Dengan adanya variasi capaian antar Puskesmas tersebut, Dinas Kesehatan melakukan upaya pembinaan dan penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga melalui peningkatan koordinasi, supervisi, serta pendampingan kepada Puskesmas dengan capaian yang masih perlu ditingkatkan. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi program kesehatan serta penguatan strategi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui langkah tersebut diharapkan terjadi peningkatan capaian Indeks Keluarga Sehat secara lebih merata di seluruh wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang.

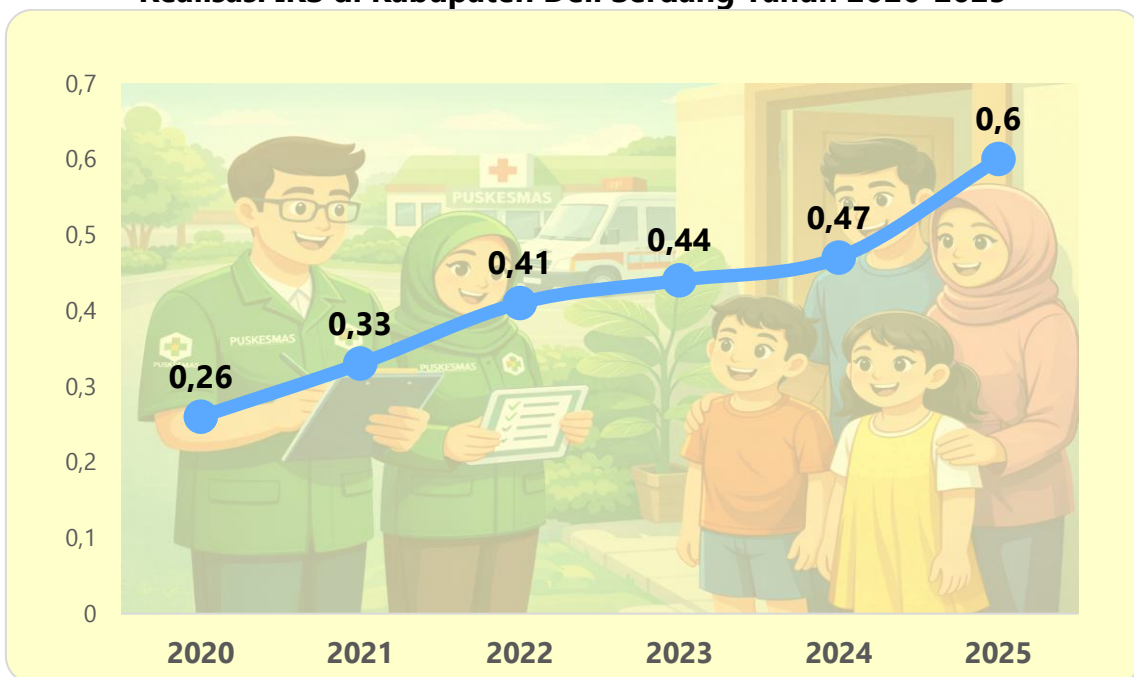
Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan pada periode Januari hingga Desember 2025, diketahui bahwa capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) tertinggi pada wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang berada pada wilayah kerja Puskesmas Hamparan Perak dengan nilai IKS sebesar 0,7 poin yang termasuk dalam kategori Pra Sehat. Sementara itu, capaian IKS terendah terdapat pada wilayah kerja Puskesmas Bandar Khalipah dan Puskesmas Kota Datar dengan nilai IKS sebesar 0,51 poin yang tergolong dalam kategori Tidak Sehat.

Pada Triwulan I dan Triwulan II, capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten masih berada pada angka 0,47 Poin. Selanjutnya, melalui pelaksanaan intervensi oleh petugas penanggung jawab Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di tingkat kabupaten dan Puskesmas, serta tindak

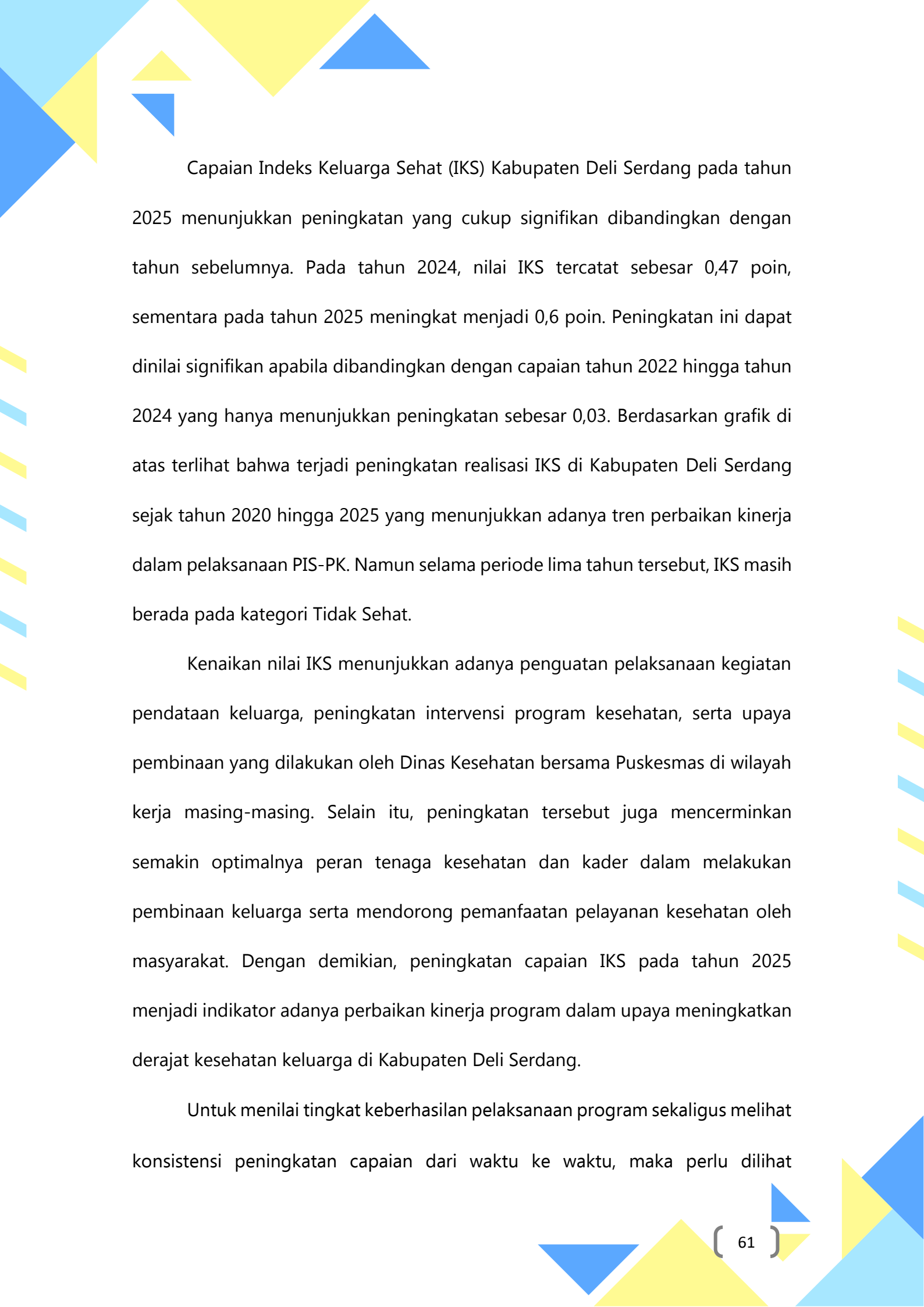
lanjut atas arahan Kepala Dinas Kesehatan untuk meningkatkan capaian IKS, dilakukan berbagai upaya penguatan pelaksanaan program di lapangan. Hasil dari intervensi tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian IKS pada Triwulan III dan Triwulan IV menjadi sebesar 0,6.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan capaian Indeks Keluarga Sehat, perlu dilakukan analisis terhadap tren capaian dalam beberapa tahun terakhir. Analisis perkembangan tersebut penting untuk menilai konsistensi peningkatan kinerja program serta mengidentifikasi dinamika capaian yang terjadi dari tahun ke tahun. Realisasi Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Deli Serdang selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.1
Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026



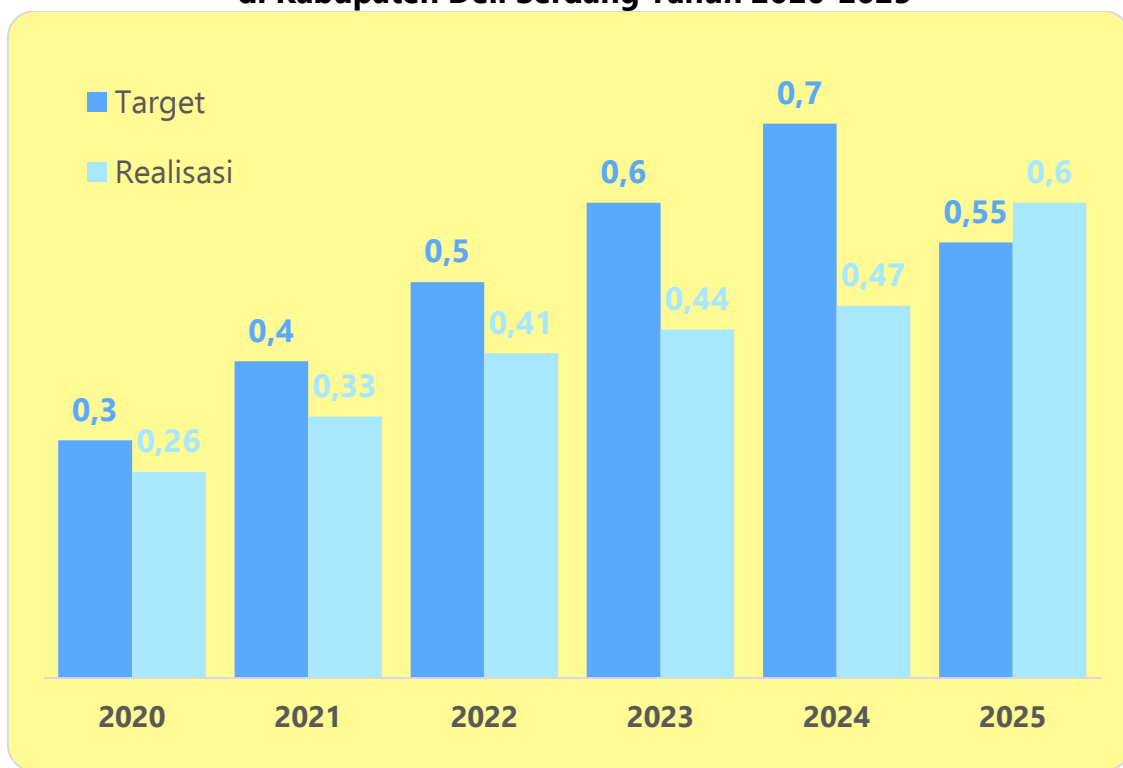
Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, nilai IKS tercatat sebesar 0,47 poin, sementara pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,6 poin. Peningkatan ini dapat dinilai signifikan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 hingga tahun 2024 yang hanya menunjukkan peningkatan sebesar 0,03. Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2020 hingga 2025 yang menunjukkan adanya tren perbaikan kinerja dalam pelaksanaan PIS-PK. Namun selama periode lima tahun tersebut, IKS masih berada pada kategori Tidak Sehat.

Kenaikan nilai IKS menunjukkan adanya penguatan pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga, peningkatan intervensi program kesehatan, serta upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama Puskesmas di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, peningkatan tersebut juga mencerminkan semakin optimalnya peran tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan pembinaan keluarga serta mendorong pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Dengan demikian, peningkatan capaian IKS pada tahun 2025 menjadi indikator adanya perbaikan kinerja program dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan keluarga di Kabupaten Deli Serdang.

Untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekaligus melihat konsistensi peningkatan capaian dari waktu ke waktu, maka perlu dilihat

perbandingan target dan realisasi IKS selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat menggambarkan sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas mampu mendorong peningkatan kinerja program. Perbandingan target dan realisasi IKS tahun 2020-2025 disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi IKS
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan grafik target dan realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan capaian kinerja secara bertahap dari tahun ke tahun. Realisasi IKS pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,26 poin dari target 0,30 poin dan meningkat menjadi 0,33 poin pada tahun 2021 dengan target sebesar 0,40 poin. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian

sebesar 0,41 poin dari target 0,50 poin serta pada tahun 2023 sebesar 0,44 poin dari target 0,60 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan capaian kinerja secara bertahap, meskipun pada periode tersebut masih terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

Pada tahun 2024, capaian IKS kembali meningkat menjadi sebesar 0,47 poin, namun masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,70 poin. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain cakupan pendataan keluarga yang belum merata di seluruh wilayah kerja Puskesmas, belum optimalnya pemenuhan indikator keluarga sehat pada sebagian keluarga sasaran, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan intervensi program di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan capaian IKS memerlukan penguatan strategi pelaksanaan program yang lebih terarah dan realistis.

Penyesuaian target pada tahun 2025 tidak dimaksudkan sebagai penurunan tingkat ambisi kinerja, melainkan sebagai upaya untuk menetapkan target yang lebih realistis dan terukur berdasarkan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Penetapan target yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan tren capaian historis berpotensi menimbulkan kesenjangan yang berulang antara target dan realisasi, sehingga kurang mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan capaian Indeks Keluarga Sehat selama lima

tahun terakhir serta kapasitas pelaksanaan program di tingkat Puskesmas. Dengan pendekatan tersebut, target yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja yang lebih akuntabel sekaligus mendorong peningkatan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui perkembangan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) serta kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, perlu dilakukan analisis perbandingan capaian indikator dari tahun ke tahun. Perbandingan capaian IKS di Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan target pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian IKS Tahun 2024, Tahun 2025, dan Target pada Akhir Periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	67,14	0,55 Poin	0,60 Poin	109,09	0,6 Poin	100

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa capaian IKS tahun 2025 meningkat dari 67,14% pada tahun 2024 menjadi 109,09% pada tahun 2025. Target pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

adalah 0,6 poin sehingga capaian pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2026. Dengan kata lain, hingga akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan, sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat sudah tercapai di tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Keluarga Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan berbagai upaya penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di seluruh wilayah kerja Puskesmas. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Puskesmas untuk meningkatkan capaian IKS sesuai dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) antara lain:

- a. Pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. Pengelolaan pangkalan data Puskesmas;
- c. Analisis dan perumusan intervensi masalah kesehatan, serta penyusunan rencana Puskesmas;
- d. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup (mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, Balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga usia lanjut); dan
- f. Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Indeks Keluarga Sehat akan dapat mencapai target jika: semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga, maka status keluarga tersebut

akan mengarah kepada Keluarga Sehat dan semakin banyak keluarga yang mencapai status Keluarga Sehat, maka akan meningkatkan nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Analisis yang dilakukan terhadap faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat antara lain:

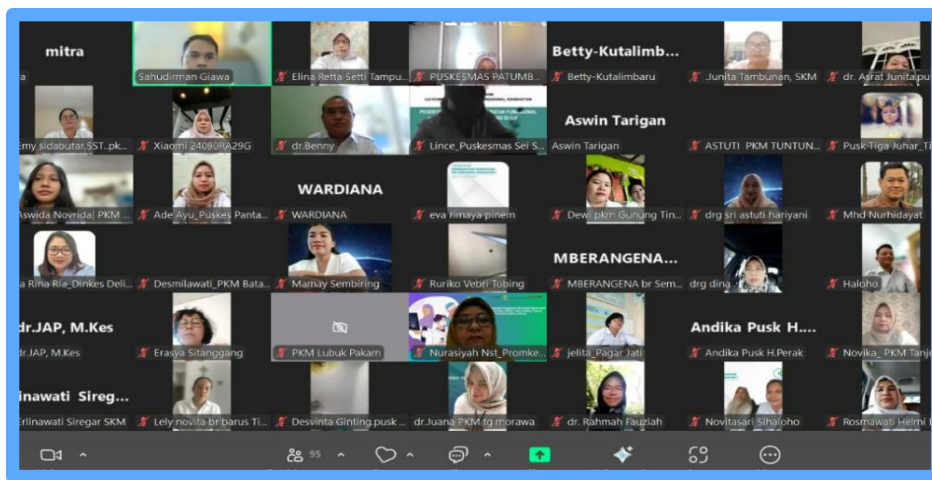
- ✓ Komitmen dan pengawasan pimpinan organisasi, khususnya melalui peran Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator IKS.

Gambar 3.3
Rapat Triwulan Monitoring dan Evaluasi Capaian IKS
Bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Puskesmas



- ✓ Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas melalui rapat rutin, pertemuan dengan kepala puskesmas, pemegang program PIS-PK, serta pertemuan daring yang dilaksanakan secara terjadwal untuk memantau perkembangan capaian IKS.

Gambar 3.4
Rapat Rutin Pemegang Program PIS-PK Dinas dan Puskesmas
Beserta Kepala Puskesmas Secara Daring



- ✓ Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas yang mendorong pendekatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup, termasuk kegiatan kunjungan rumah kepada keluarga sasaran.

Gambar 3.5
Kunjungan Rumah Kepala Keluarga Sasaran



- ✓ Dukungan pendanaan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
- ✓ Pemanfaatan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sebagai dasar dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan keluarga dan menentukan sasaran intervensi pelayanan kesehatan secara lebih tepat.

Gambar 3.6
Intervensi Lanjutan Hasil Identifikasi Kondisi Kesehatan Keluarga



- ✓ Keterlibatan jejaring pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu, dalam mendukung pelaksanaan intervensi kesehatan keluarga.

Gambar 3.7
Keterlibatan Posyandu dalam Pelaksanaan PIS-PK



Sasaran 2


Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025, Nilai AKIP yang terealisasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 83,44 Nilai. Dengan perbandingan realisasi dan target, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berada pada angka 100,89%.

Nilai AKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung pelaksanaan SAKIP, antara lain Laporan Kinerja, Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Secara umum, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola akuntabilitas kinerja serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang optimal, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai sejauh mana implementasi SAKIP telah dilaksanakan pada setiap perangkat daerah.



Untuk memastikan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan instansi pemerintah. Evaluasi tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas penerapan sistem manajemen kinerja serta mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan. Melalui pelaksanaan evaluasi tersebut diharapkan perangkat daerah dapat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP menghasilkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan akumulasi dari penilaian terhadap seluruh komponen dalam evaluasi SAKIP. Komponen penilaian tersebut mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian sasaran atau kinerja organisasi. Hasil penilaian terhadap komponen-komponen tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk nilai AKIP yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selanjutnya disajikan dalam bentuk klasifikasi predikat nilai yang menunjukkan tingkat kualitas penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah. Klasifikasi tersebut menjadi acuan dalam menilai tingkat kematangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta memberikan gambaran mengenai posisi kinerja instansi dalam skala penilaian yang telah ditetapkan. Rincian kategori predikat nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Kategori Predikat Nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	>0-30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang menggambarkan tingkat penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan perangkat daerah. Capaian nilai tersebut mencerminkan konsistensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai AKIP yang diperoleh juga menunjukkan adanya upaya perbaikan yang terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hasil penilaian tersebut, disajikan informasi terkait realisasi nilai hasil evaluasi yang dilihat berdasarkan komponen penilaian beserta bobot yang ditetapkan. Penyajian ini

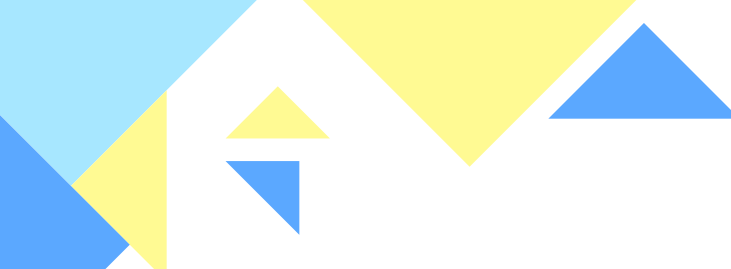
bertujuan untuk menunjukkan kontribusi masing-masing komponen terhadap nilai AKIP yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Rincian realisasi nilai hasil evaluasi beserta bobot masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	24,80
2	Pengukuran Kinerja	30	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,64
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,44
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber: Inspektorat Kab. Deli Serdang, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Kesehatan pada komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 24,80; komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 25,50; komponen pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 12,64; dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai sebesar 20,50. Akumulasi dari seluruh nilai pada masing-masing komponen menghasilkan total Nilai AKIP Dinas Kesehatan sebesar 83,44. Dengan capaian tersebut, tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan berada pada predikat A dengan interpretasi **MEMUASKAN**.



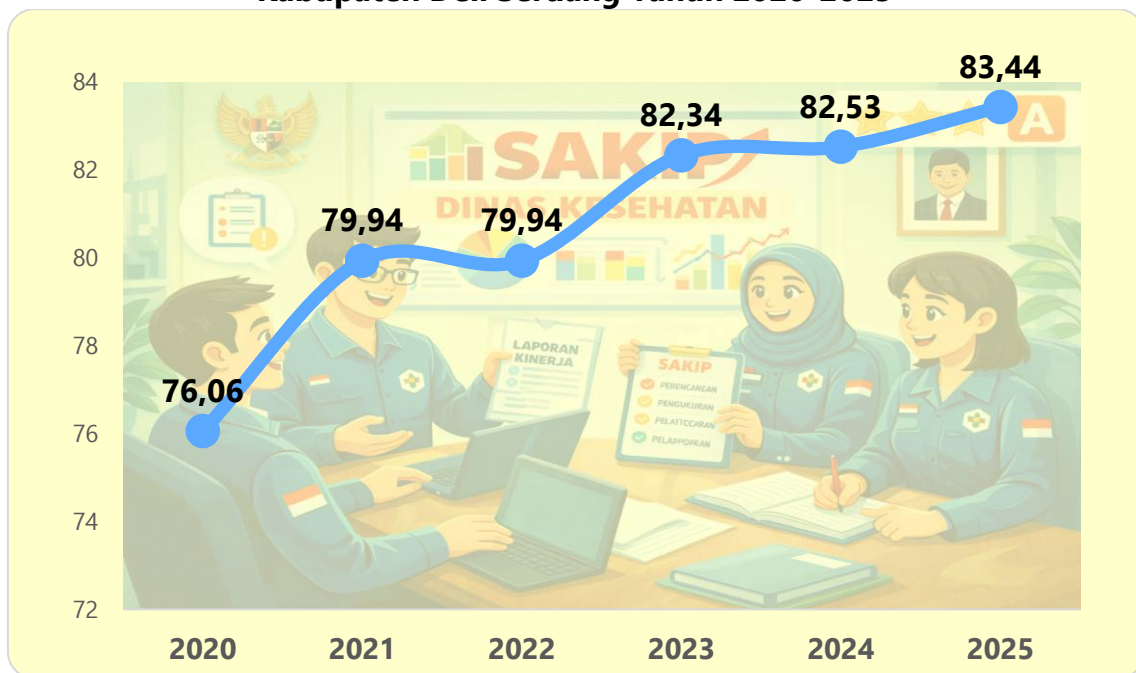
Nilai AKIP Dinas Kesehatan yang dihasilkan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP menunjukkan bahwa komponen pengukuran kinerja merupakan komponen dengan capaian nilai tertinggi pada akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Komponen tersebut memperoleh nilai sebesar 25,50 dari bobot maksimal 30 atau tercapai sebesar 85%. Sementara itu, komponen dengan capaian nilai relatif paling rendah terdapat pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memperoleh nilai sebesar 20,50 dari bobot maksimal 25 atau tercapai sebesar 82%.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan kinerja telah berada pada kategori yang baik. Ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang akan terus melakukan penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja, khususnya melalui penguatan kualitas analisis capaian kinerja, peningkatan konsistensi data kinerja, serta pemanfaatan hasil pelaporan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja organisasi.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, perlu dilihat nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa tahun terakhir. Penyajian data capaian nilai AKIP selama lima tahun terakhir bertujuan untuk menunjukkan tren peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Dinas Kesehatan. Melalui

informasi tersebut dapat diketahui perkembangan tingkat akuntabilitas kinerja serta konsistensi upaya perbaikan yang dilakukan dari tahun ke tahun. Realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2020-2025 dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 3.8
Realisasi Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025

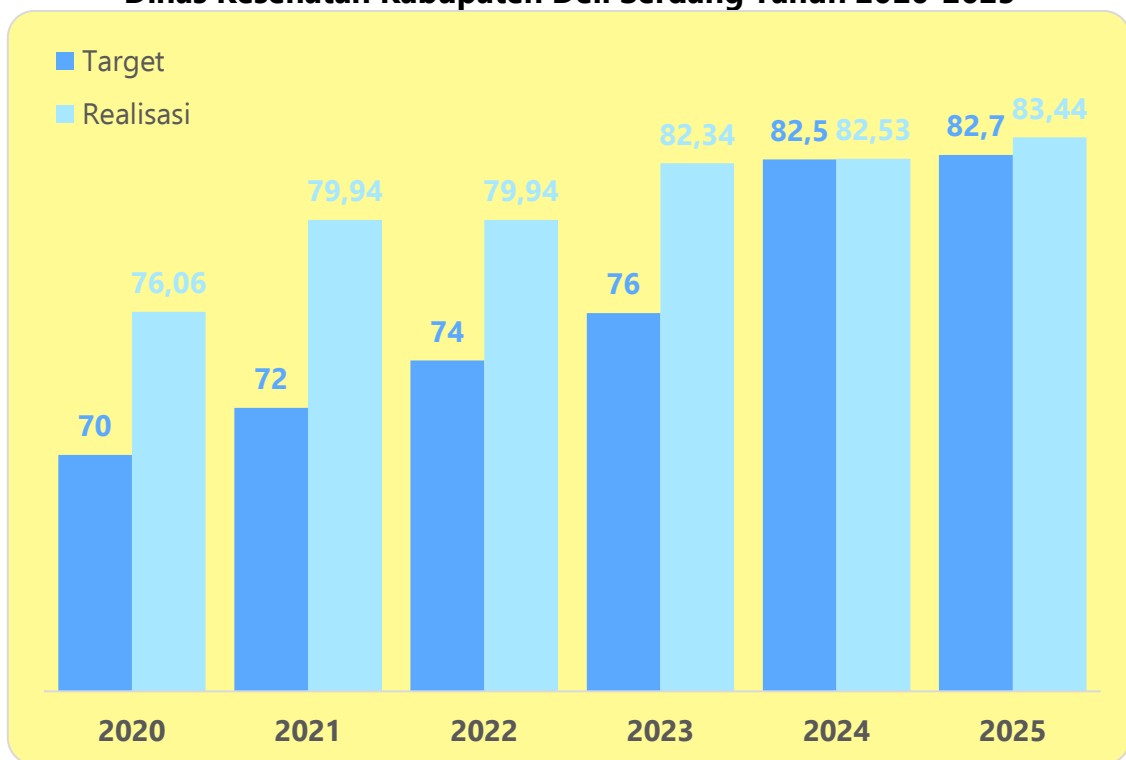


Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi Nilai AKIP di Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2020 hingga tahun 2025. Nilai AKIP Dinas Kesehatan meningkat dari nilai 82,53 pada tahun 2024 menjadi nilai 83,44 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan serta komitmen dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.


Melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan melihat konsistensi peningkatan capaian dari waktu ke waktu dapat dilihat melalui perbandingan target dan realisasi selama lima tahun terakhir. Hal ini dapat menggambarkan sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja. Perbandingan target dan realisasi nilai AKIP Dinas Kesehatan tahun 2020-2025 disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025



Sumber: Subbag. Program Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan grafik target dan realisasi nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020–2025, terlihat adanya tren peningkatan capaian kinerja secara



bertahap dari tahun ke tahun. Realisasi nilai AKIP pada tahun 2020 tercatat sebesar 76,06 dari target nilai 70 dan meningkat menjadi 79,94 pada tahun 2021 dengan target nilai 72. Peningkatan capaian berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi yang sama seperti tahun sebelumnya, yakni 79,94 dari target 74, dan pada tahun 2023 tercatat sebesar 82,34 dari target 76. Capaian tahun 2023 ini menjadi dasar evaluasi untuk penyesuaian target indikator nilai AKIP pada periode Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025–2026.

Realisasi nilai AKIP pada tahun 2024 tercatat sebesar 82,53 dari target 82,50, dan pada tahun 2025 mencapai 83,44 dari target 82,70. Kondisi ini menunjukkan perbaikan capaian kinerja secara konsisten meskipun masih terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Kesenjangan pada tahun 2023 sudah diperbaharui melalui dokumen perencanaan pada tahun berikutnya agar penetapan target kinerja lebih mencerminkan capaian aktual dan prinsip perencanaan kinerja yang realistis, terukur, serta berorientasi hasil. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam memperkuat keterkaitan antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta pelaporan kinerja.

Dengan demikian, peningkatan nilai AKIP dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja, memperkuat akuntabilitas organisasi, dan mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Perbandingan capaian nilai AKIP di Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan target pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Nilai AKIP Tahun 2024, Tahun 2025, dan
Target pada Akhir Periode Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai AKIP	100,04	82,70 Nilai	83,44 Nilai	100,89	82,90 Nilai	100,65

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa capaian nilai AKIP tahun 2025 meningkat dari 100,04% pada tahun 2024 menjadi 100,89% pada tahun 2025. Target pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 adalah 82,90 sehingga capaian pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2026. Dengan kata lain, hingga akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan, sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat sudah tercapai di tahun 2025.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, evaluasi nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, capaian sasaran strategis, dan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Evaluasi ini tidak hanya menekankan pencapaian angka, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara target dan realisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan, penyesuaian target, dan

strategi peningkatan kualitas manajemen kinerja pada periode berikutnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan pada tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

- a) Dokumen perencanaan kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah tersedia diantaranya: Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (Rancangan Renstra 2025-2029); Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek (Renja); Dokumen Perencanaan Aktivitas yang Mendukung Kinerja (Rencana Aksi, IKU); Dokumen Perencanaan Anggaran yang Mendukung Kinerja (DPA, RKA); dan Perjanjian Kinerja.
- b) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, keterkaitan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD. Arah kebijakan Renstra 5 tahun kedepan berfokus pada Pembangunan kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk penjabaran dari visi misi RPJMD "*sehat masyarakatnya dan sehat pelayanannya*".
- c) Dokumen perencanaan kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, sehingga diperlukan penekanan kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Dokumen kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah tersedia diantaranya dokumen perencanaan kinerja jangka panjang dan jangka pendek, pedoman teknis pengukuran kinerja, selain itu terdapat definisi operasional atau formulasi perhitungan indikator kinerja.
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan, data kinerja yang dikumpulkan bersumber dari penanggungjawab yang membidangi dan telah relevan untuk mengukur kualitas dokumen kinerja.
- c) Dokumen kinerja telah dimanfaatkan namun perlu dioptimalkan agar setiap unit/pegawai pada satuan kerja memahami dapat dapat berperan memberikan data dan informasi yang relevan sesuai kebutuhan.

3) Pelaporan Kinerja

- a) Dokumen pelaporan kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan telah di reviu oleh APIP.
- b) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya; dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan; dan dokumen laporan kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

- c) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai dan masih menganggap laporan kinerja merupakan tanggung jawab Kasubbag. Program.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Bahwa hasil evaluasi internal telah dimanfaatkan dalam rangka mendukung efektifitas dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain:

- 1) Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang agar selalu terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaporan dokumen kinerja.
- 2) Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang agar memastikan data kinerja yang dikumpulkan dari setiap pegawai, tingkatan jabatan maupun bidang telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dengan memastikan: sumber data valid dan bersumber dari penanggungjawab yang membidangi; dan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.


Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk memenuhi rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain:

1) Dokumen perencanaan kinerja sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan agar seluruh pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain:

- a) **Sosialisasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029:** Dinas Kesehatan menyelenggarakan pertemuan sosialisasi Renstra Dinas Kesehatan 2025–2029 kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan dan sekaligus membimbing Puskesmas dalam penyusunan Renstra Puskesmas 2025–2029 setelah Ranhir Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 selesai pada bulan Desember 2025;

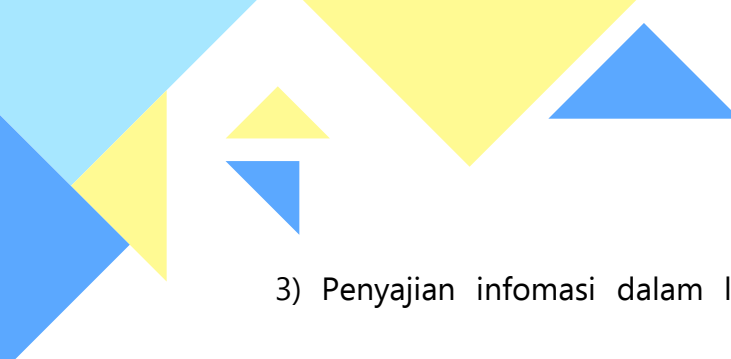
Gambar 3.10
Pertemuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan



- 
- b) **Pertemuan Mingguan Kepala Dinas:** Kepala Dinas Kesehatan telah mengadakan pertemuan rutin setiap Jum'at bersama seluruh Kabid, Katim, hingga staf terkait untuk membahas capaian kinerja, termasuk capaian IKU, yang menjadi dasar penilaian Bupati terhadap Dinas Kesehatan yang juga menjadi bahan rapat koordinasi mingguan sekaligus menjadi penilaian individu Kepala Dinas Kesehatan yang pelaporannya dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja per triwulan.
- c) **Monitoring dan Evaluasi Organisasi:** Pertemuan mingguan juga dilakukan bersama para Kepala Puskesmas dimana hal ini berfungsi sebagai media monitoring dan evaluasi capaian organisasi, pelaksanaannya rutin baik secara luring maupun daring (pada saat Kepala Dinas Kesehatan tugas ke luar kota);
- d) **Keterlibatan Pegawai:** Seluruh pegawai dilibatkan aktif pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas hingga PK tersebut diturunkan pada tingkat eselon III hingga tingkat staf, target pada PK disesuaikan dengan target pada dokumen perencanaan sehingga seluruh staf sudah mengetahui target yang harus dicapainya untuk mendukung pencapaian target Dinas Kesehatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.


2) Dokumen kinerja telah dimanfaatkan dan dioptimalkan sehingga setiap unit/pegawai pada satuan kerja memahami dapat dapat berperan memberikan data dan informasi yang relevan sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain:

- a) **Penguatan Peran Pegawai dalam Penyediaan Data:** Seluruh unit kerja telah diberi pembinaan untuk lebih memahami pentingnya dokumen kinerja sebagai pedoman operasional. Setiap pegawai diarahkan agar secara proaktif menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan relevan sesuai kebutuhan monitoring dan pelaporan, sehingga dokumen kinerja dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan.
- b) **Optimalisasi Pelaporan melalui Aplikasi:** Dinas Kesehatan telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan kinerja per program baik milik pusat maupun pemerintah daerah, sehingga kapanpun atasan atau pihak-pihak lainnya membutuhkan data, informasi dapat langsung ditarik dari aplikasi. Pelaporan melalui aplikasi telah memudahkan pegawai dalam menyampaikan data yang relevan dan memastikan tindak lanjut serta pengambilan keputusan dapat dilakukan cepat dan tepat sasaran.



3) Penyajian informasi dalam laporan kinerja sudah menjadi kepedulian seluruh pegawai dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kasubbag. Program saja. Dinas Kesehatan telah membentuk tim penyusun LKIP Dinas Kesehatan, tim ini bertugas secara proaktif dan koordinatif dalam pengumpulan, verifikasi, dan penyajian informasi kinerja. Tim ini memastikan data dan laporan tersedia sesuai kebutuhan, termasuk saat dibutuhkan di luar jam kerja, sehingga mendukung penyajian laporan kinerja yang cepat dan akurat. Anggota tim merupakan perwakilan tiap bidang, data dan informasi juga didapatkan perwakilan tim dari seluruh pegawai terkait di masing-masing bidang sehingga diharapkan hal ini akan meningkatkan kepedulian seluruh pegawai terhadap kualitas laporan kinerja Dinas Kesehatan.

Analisis yang dilakukan terhadap sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan bahwa capaian sasaran tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan dan penguatan implementasi manajemen kinerja yang dilakukan secara konsisten oleh Dinas Kesehatan, sehingga menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan. Hal ini khususnya tercapai melalui upaya tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang disampaikan evaluator Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP.



Berbagai perbaikan telah dilakukan pada setiap tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja organisasi. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pemahaman seluruh unit kerja terhadap dokumen perencanaan dan dokumen kinerja, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, serta peningkatan kualitas penyediaan dan penyajian data serta informasi kinerja yang akurat dan tepat waktu.

Penguatan implementasi manajemen kinerja tersebut diarahkan agar dokumen perencanaan dan dokumen kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian pada Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan sektor kesehatan. Dengan demikian, keberhasilan yang ingin dicapai tidak hanya diukur dari terpenuhinya realisasi indikator kinerja semata, tetapi lebih menekankan pada pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP, berbagai langkah perbaikan tersebut juga menjadi bagian dari strategi Dinas Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan kinerja dan meningkatkan kualitas akuntabilitas pada periode mendatang. Melalui penguatan koordinasi antar unit kerja, peningkatan

keterlibatan seluruh pegawai dalam pengelolaan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, diharapkan implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat semakin efektif. Dengan demikian, capaian Nilai AKIP tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga berpotensi meningkat seiring dengan semakin kuatnya orientasi Dinas Kesehatan pada pencapaian hasil dan dampak pembangunan kesehatan.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai indikator untuk mengukur sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Pada tahun 2025, capaian IKM yang terealisasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 88,92 Poin. Setelah dilakukan perhitungan dari kedua indikator tersebut diperoleh rata-rata sebesar 102,41%. Dengan perbandingan realisasi dan target, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah tercapai sebesar 100,30%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui survei yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara publik. IKM berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja organisasi

untuk memastikan layanan yang disediakan semakin baik, efisien, dan efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil IKM dapat menjadi indikator keberhasilan program di lembaga layanan publik. Unsur yang biasanya dinilai dalam survei antara lain:

- ✓ **Persyaratan**
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- ✓ **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.
- ✓ **Waktu Penyelesaian**
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- ✓ **Biaya/Tarif**
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- ✓ **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

✓ Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

✓ Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

✓ Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

✓ Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan atau untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{N}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus SKM unit pelayanan dikali 25 sehingga diperoleh kinerja sesuai tabel berikut:

Tabel 3.9
Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Pengumpulan data untuk pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan di seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui kuesioner yang berisi sembilan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner manual dibagikan setelah pelayanan di setiap poli Puskesmas. Beberapa Puskesmas telah mengembangkan inovasi dengan menyediakan kuesioner secara online yang dapat diakses melalui *QR Code* di berbagai titik layanan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara

daring pada triwulan keempat menggunakan aplikasi **SUKMA DELI** milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ruang lingkup penilaian IKM yang dilakukan di Dinas Kesehatan berupa:

- Izin survei penelitian pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Pengurusan sertifikat penyuluhan keamanan pangan pada Seksi Kesehatan Lingkungan;
- Penerbitan surat kematian pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- Penerbitan surat rekomendasi peserta *unregister* pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- Permohonan perjanjian kerjasama (MoU) kepaniteraan klinik *senior stase public health* mahasiswa co-ass Fakultas Kedokteran pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- Izin survei pemeriksaan kualitas air minum pada UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah;

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Dinas Kesehatan (termasuk UPT. Labkesda) dan 34 Unit Pelaksana Teknis Puskesmas. Survei ini dilakukan secara berkala setiap triwulan dan digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pelayanan publik yang diberikan. Capaian IKM pada triwulan IV tahun 2025 di Dinas Kesehatan beserta UPTnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.10
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Unit kerja	Hasil IKM	Keterangan
1	Puskesmas Gunung Meriah	86,05	Baik
2	Puskesmas Tiga Juhar		Sangat Baik
3	Puskesmas Sibolangit	95,90	Sangat Baik
4	Puskesmas Bandar Baru	88,03	Baik
5	Puskesmas Kutalimbaru	93,27	Sangat Baik
6	Puskesmas Gunung Tinggi	83,40	Baik
7	Puskesmas Tuntungan	82,14	Baik
8	Puskesmas Namorambe	89,91	Sangat Baik
9	Puskesmas Biru-Biru	89,19	Sangat Baik
10	Puskesmas Talun Kenas	84,52	Baik
11	Puskesmas Sialang	86,14	Baik
12	Puskesmas Galang	94,49	Sangat Baik
13	Puskesmas Petumbukan	92,49	Sangat Baik
14	Puskesmas Tanjung Morawa	85,40	Baik
15	Puskesmas Dalu Sepuluh	83,13	Baik
16	Puskesmas Patumbak	86,52	Baik
17	Puskesmas Deli Tua	85,16	Baik
18	Puskesmas Mulyorejo	88,37	Sangat Baik
19	Puskesmas Sei Mencirim	87,43	Baik
20	Puskesmas Sei Semayang	82,73	Baik
21	Puskesmas Hamparan Perak	91,30	Sangat Baik
22	Puskesmas Kota Datar	87,25	Baik
23	Puskesmas Labuhan Deli	88,10	Baik
24	Puskesmas Pematang Johar	85,78	Baik
25	Puskesmas Bandar Khalipah	88,52	Sangat Baik
26	Puskesmas Kenangan	98,28	Sangat Baik
27	Puskesmas Tanjung Rejo	86,64	Baik
28	Puskesmas Batang Kuis	88,12	Baik
29	Puskesmas Pantai Labu	84,50	Baik
30	Puskesmas Aras Kabu	88,32	Sangat Baik
34	Puskesmas Karang Anyer	87,24	Baik
32	Puskesmas Lubuk Pakam	89,72	Sangat Baik
33	Puskesmas Pagar Jati	89,97	Sangat Baik
34	Puskesmas Pagar Merbau	97,17	Sangat Baik

No	Unit kerja	Hasil IKM	Keterangan
	<i>Rata-Rata IKM Puskesmas</i>	88,34	Sangat Baik
35	Dinas Kesehatan	89,50	Sangat Baik
	Rata-Rata IKM	88,92	Sangat Baik

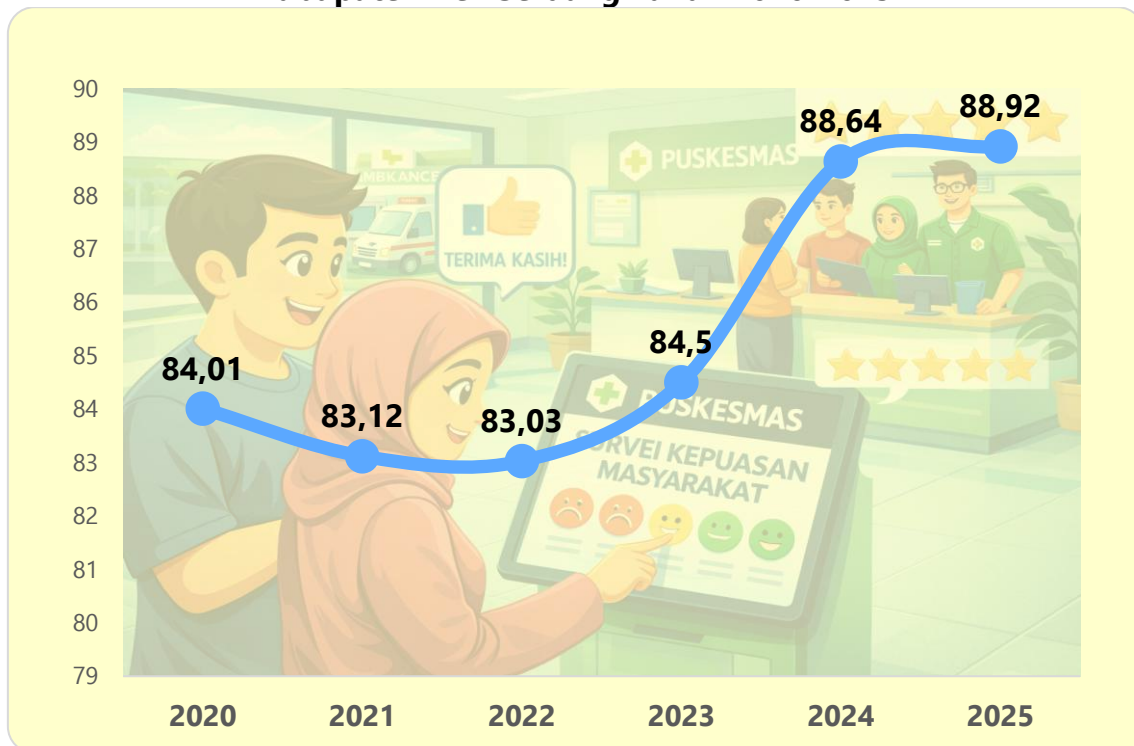
Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan tabel 3.13 di atas diketahui bahwa rata-rata IKM Puskesmas tercapai dengan nilai 88,34 Poin dengan kategori Sangat Baik, sedangkan untuk Dinas Kesehatan rata-rata IKM tercapai dengan nilai 89,50 Poin dengan kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil rata-rata IKM Puskesmas dan Dinas Kesehatan diperoleh hasil IKM secara total pada tahun 2025 adalah sebesar 88,92 Poin atau dengan kategori Sangat Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan meningkat dari 88,64 poin dengan kategori Sangat Baik menjadi 88,92 poin pada tahun 2025, tetap dalam kategori Sangat Baik. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus menunjukkan kepedulian dan respons positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada triwulan IV 2025, diketahui bahwa IKM Puskesmas paling tinggi adalah Puskesmas Pagar Merbau dengan rata-rata 97,17 Poin (Kategori Sangat Baik) dan paling rendah adalah Puskesmas Tuntungan dengan rata-rata 82,14 Poin (Kategori Baik). Terdapat sebanyak 14 Puskesmas (41,18%) di Kabupaten Deli Serdang dengan IKM kategori Sangat Baik dan sisanya 28 Puskesmas (58,82%) dengan IKM kategori Baik.


Realisasi IKM Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2020-2025 dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 3.11
Realisasi IKM Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025



Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020 hingga 2025 menunjukkan dinamika perkembangan yang signifikan. Pada awal periode, nilai IKM tercatat sebesar 84,01 poin di tahun 2020, kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi 83,12 poin pada 2021 dan sedikit menurun lagi menjadi 83,03 poin pada 2022.



Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan pada tahun-tahun tersebut.

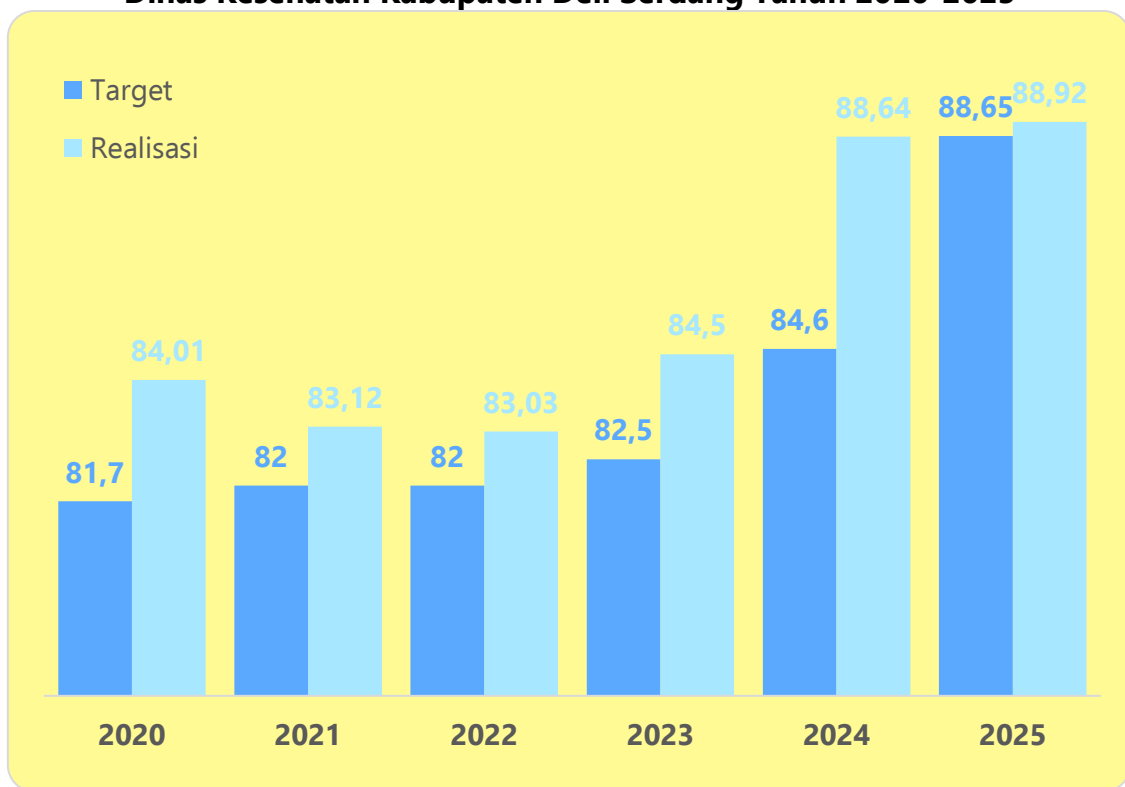
Memasuki tahun 2023, nilai IKM mulai menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan menjadi 84,5 poin, yang kemudian meningkat tajam menjadi 88,64 poin pada tahun 2024, menandai perbaikan kualitas layanan yang cukup besar dan keberhasilan upaya peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2025, capaian IKM kembali naik menjadi 88,92 poin, mempertahankan kategori *Sangat Baik*. Peningkatan berkelanjutan ini mencerminkan keberhasilan Dinas Kesehatan dalam melakukan inovasi layanan, pembenahan sistem, dan peningkatan kepuasan masyarakat secara konsisten.

Secara keseluruhan, grafik capaian IKM menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan awal, upaya strategis Dinas Kesehatan berhasil memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), disajikan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian IKM pada periode 2020 hingga 2025. Analisis ini penting untuk menilai seberapa efektif perencanaan dan


pelaksanaan program pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi harapan masyarakat. Melalui perbandingan ini, dapat diketahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah dirumuskan serta menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan layanan ke depan. Perbandingan target dan realisasi IKM tahun 2020-2025 dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi IKM di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025



Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Analisis perbandingan target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama periode 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan secara konsisten berhasil memenuhi dan bahkan melampaui target yang telah



ditetapkan pada hampir seluruh tahun. Pada tahun 2020, realisasi IKM mencapai 84,01 poin, melebihi target yang sebesar 81,7 poin, menandakan capaian awal yang baik. Tren ini sedikit mengalami fluktuasi di tahun 2021 dan 2022, di mana realisasi IKM (83,12 dan 83,03 poin) masih berada di atas target (82 dan 82 poin), namun selisihnya tidak terlalu besar.

Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi 84,5 poin, lebih tinggi dari target 82,5 poin, menandakan adanya perbaikan layanan yang nyata. Pada tahun 2024, capaian semakin optimal dengan realisasi 88,64 poin, jauh melampaui target 84,6 poin yang menunjukkan keberhasilan strategi dan implementasi program peningkatan layanan. Untuk tahun 2025, target IKM disesuaikan naik secara signifikan menjadi 88,65 poin, mengikuti tren peningkatan capaian sebelumnya. Realisasi pada tahun ini diperkirakan mencapai 88,92 poin, kembali melampaui target dan mempertahankan kategori *Sangat Baik*.

Penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja (PK) 2025 ini mencerminkan optimisme dan komitmen Dinas Kesehatan dalam terus meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian realisasi yang selalu melebihi target menunjukkan efektivitas perencanaan, implementasi, dan monitoring Dinas Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui layanan yang berkualitas.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kualitas layanan, berikut disajikan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 dan 2025, serta target yang ditetapkan untuk periode akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026. Tabel ini memberikan informasi penting untuk mengevaluasi pencapaian saat ini sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan di masa mendatang. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan target pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKM Tahun 2024, Tahun 2025, dan
Target pada Akhir Periode Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,78	88,65 Poin	88,92 Poin	100,30	84,80 Poin	104,86


Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Tabel 3.14 di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 menurun dari 104,78% pada tahun 2024 menjadi 100,30% pada tahun 2025. Target pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 adalah 84,80 sehingga capaian pada tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2026. Dengan kata lain, hingga akhir tahun Renstra Dinas Kesehatan, sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat sudah tercapai di tahun 2025.

Analisis yang dilakukan terhadap penyebab keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Adanya komitmen dari Kepala Dinas Kesehatan untuk terus memperbaiki standar pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya di Puskesmas sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, jelas, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
- 2) Adanya inovasi dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKM. Beberapa Puskesmas telah mengembangkan metode pengisian kuesioner secara daring melalui QR Code yang ditempatkan di berbagai titik layanan, sehingga memudahkan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga telah memanfaatkan aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online melalui aplikasi **SUKMA DELI** milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,



sehingga proses pengumpulan dan pengolahan data kepuasan masyarakat menjadi lebih efektif dan transparan.

- 3) Adanya penguatan koordinasi dan monitoring kinerja pelayanan yang dilakukan secara rutin oleh Kepala Dinas Kesehatan, pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai. Dengan adanya evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan serta respons yang cepat terhadap masukan masyarakat, perbaikan layanan dapat dilakukan secara lebih terarah. Upaya-upaya tersebut secara keseluruhan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam mempertahankan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Layanan Secara Berkelanjutan

Dinas Kesehatan akan secara rutin mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kesehatan serta staf pelayanan agar standar kualitas layanan tetap terjaga dan terus berkembang. Dengan mengadopsi praktik terbaik dan inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kualitas layanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Upaya meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan yang tersedia sangat penting agar masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan layanan secara optimal. Selain itu, melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberikan masukan dan evaluasi akan memperkuat kualitas layanan serta membangun kepercayaan publik.

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi penggunaan aplikasi pelaporan dan sistem informasi manajemen memudahkan monitoring capaian layanan dan tingkat kepuasan masyarakat secara lebih efektif dan cepat. Dengan memastikan akses informasi layanan yang mudah dan transparan, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan responsif.

4) Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Dinas Kesehatan akan tetap melaksanakan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap capaian kinerja dan kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi ini akan segera ditindaklanjuti, terutama apabila ditemukan masalah yang berpotensi menurunkan kualitas layanan. Rapat koordinasi dan review capaian bersama seluruh unit kerja dan Puskesmas akan memperkuat sinergi dalam peningkatan kinerja.

5) Peningkatan Keterlibatan dan Komitmen Pegawai

Membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat perlu diintegrasikan melalui Perjanjian Kinerja dan sistem penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Setiap pegawai harus memahami pentingnya peran mereka dalam menyediakan data, informasi, dan layanan berkualitas demi mencapai target organisasi.

6) Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perbaikan dan penambahan sarana prasarana pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian untuk mendukung kenyamanan dan efisiensi layanan. Sarpras yang memadai akan meningkatkan pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan dan mendukung peningkatan kepuasan. Upaya pemeliharaan, peningkatan kualitas, serta pengadaan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sehingga semakin optimal dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

7) Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan

Sinergi dengan berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, penting untuk mendukung upaya peningkatan kualitas layanan. Melalui kemitraan yang baik, sumber daya dan inovasi dapat dimaksimalkan demi tercapainya pelayanan publik yang prima.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan yang akuntabel diperlukan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan. Alokasi anggaran yang direncanakan secara tepat dan realisasi yang optimal menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang dimuat dalam DPPA pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 704.478.173.255,00. Anggaran tersebut sudah termasuk sub unit UPT Puskesmas, UPT RSUD Pancur Batu, dan UPT RSUD Bangun Purba dengan rincian:

- Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 555.859.086.803,00
- Anggaran UPT Puskesmas sebesar Rp. 108.554.398.233,00
- Anggaran UPT RSUD Pancur Batu sebesar Rp. 23.621.802.933,00
- Anggaran UPT RSUD Bangun Purba sebesar Rp. 16.442.885.286,00

dari keseluruhan alokasi anggaran Dinas Kesehatan beserta sub unitnya, anggaran pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 609.638.930.842 atau dengan capaian realisasi sebesar 86,54%. Realisasi ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 87,62%.

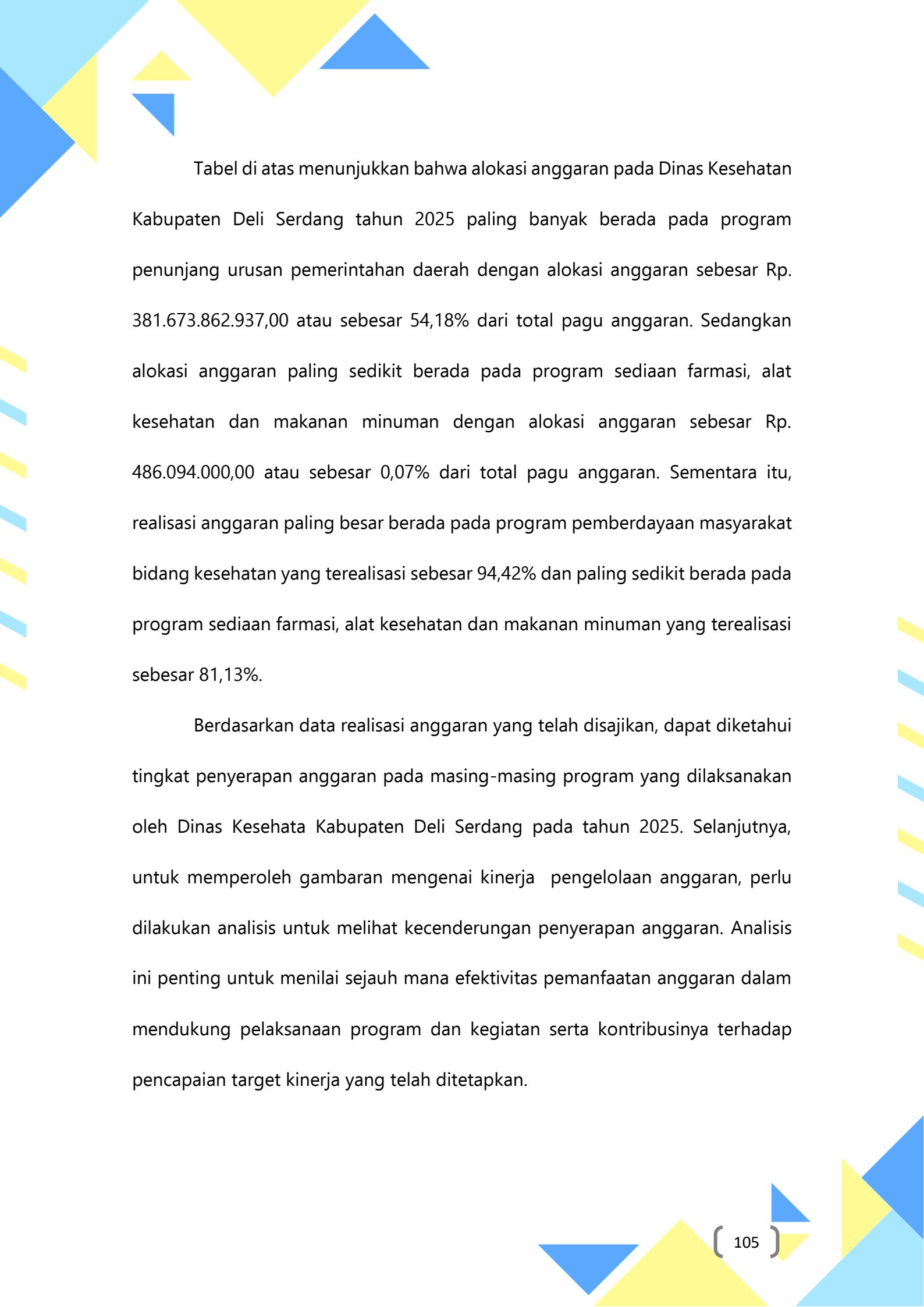
Rincian realisasi anggaran per program Dinas Kesehatan Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran per Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	381.673.862.937	317.072.147.029,81	83,07
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	318.763.020.468	288.880.491.321,45	90,63
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.777.678.950	2.557.790.548	92,08
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	486.094.000	394.391.042	81,13
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	777.516.900	734.110.900	94,42
JUMLAH		704.478.173.255	609.638.930.841,26	86,54

Sumber: Subbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026



Tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 paling banyak berada pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 381.673.862.937,00 atau sebesar 54,18% dari total pagu anggaran. Sedangkan alokasi anggaran paling sedikit berada pada program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 486.094.000,00 atau sebesar 0,07% dari total pagu anggaran. Sementara itu, realisasi anggaran paling besar berada pada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terealisasi sebesar 94,42% dan paling sedikit berada pada program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang terealisasi sebesar 81,13%.

Berdasarkan data realisasi anggaran yang telah disajikan, dapat diketahui tingkat penyerapan anggaran pada masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025. Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja pengelolaan anggaran, perlu dilakukan analisis untuk melihat kecenderungan penyerapan anggaran. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025

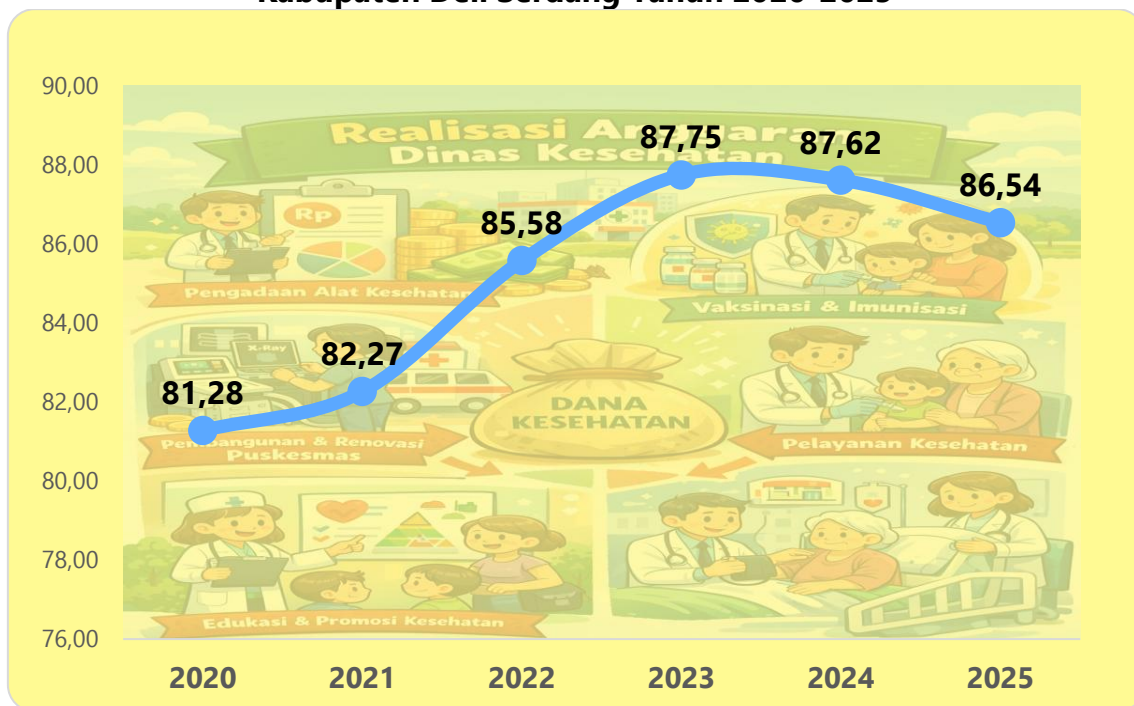
No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2020	256.057.626.115	208.129.121.572	81,28
2	2021	539.427.613.714	443.781.031.826	82,27
3	2022	527.858.946.095	451.759.975.201	85,58
4	2023	525.511.521.410	461.136.113.791	87,75
5	2024	589.483.305.915	516.497.659.793	87,62
6	2025	704.478.173.255	609.638.930.841	86,54

Sumber: Subbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Dinas Kesehatan meningkat dari Rp. 589.483.305.915,00 pada tahun 2024 ke Rp. 704.478.173.255,00. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan juga meningkat dari Rp. 516.497.659.793,00 pada tahun 2024 menjadi Rp. 609.638.930.841,26 pada tahun 2025. Peningkatan alokasi dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya penguatan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pengelolaan anggaran, selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap tren serapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.

Tren serapan anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020-2025 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 3.13
Tren Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2025



Sumber: Subbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 serapan anggaran Dinas Kesehatan semakin meningkat hingga tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dari 87,75% pada tahun 2023 menjadi 87,62% pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 86,54% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Dinas Kesehatan selama periode 2020–2025 menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang relatif baik karena seluruhnya berada di atas 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di sektor kesehatan berjalan cukup optimal.

Berdasarkan realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2025, maka dapat dihitung nilai efisiensi berdasarkan capaian tiga Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Rumus pengukuran dan penilaian efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = 1 - \left(\frac{\text{realisasi anggaran: realisasi outcome}}{\text{pagu anggaran: target outcome}} \right) \times 100: n$$

Untuk mengetahui nilai efisiensi atas capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan realisasi anggaran, maka disajikan hasil penghitungan nilai efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.14
Penilaian Efisiensi Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target	Realisasi	Efisiensi (%)
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	322.804.310.318	292.566.783.811	0,55	0,60	16,92
2	Nilai AKIP	254.467.952	233.193.200	82,70	83,44	9,17
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	381.419.394.985	316.838.953.830	88,65	88,92	17,18
Jumlah						43,28
Rata-Rata Efisiensi						14,43

Sumber: Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2025 Dinas Kesehatan telah melakukan efisiensi sebesar 14,43% untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terlihat bahwa ada efisiensi anggaran dalam mencapai tiga sasaran strategis yaitu sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dengan efisiensi anggaran sebesar 16,92%; sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan efisiensi anggaran sebesar 9,17%; dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan efisiensi anggaran sebesar 17,18%.

3.4 Realisasi Anggaran

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung tercapainya indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.15
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
Sasaran: Meningkatnya Keluarga Sehat					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	318.763.020.468	288.880.491.321	90,63	109,09

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	80.138.238.372	72.646.256.742	90,65	98,33
	Pengembangan Puskesmas	891.720.000	837.460.400	93,92	100,00
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	320.947.282	301.098.500	93,82	100,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.856.062.716	2.736.483.000	95,81	100,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	213.723.000	211.597.000	99,01	100,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	111.000.000	106.780.000	96,20	100,00
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.966.560.496	28.765.904.614	89,99	93,00
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	826.618.000	767.079.511	92,80	99,94
	Pengembangan Rumah Sakit	3.716.511.026	3.232.014.813	86,96	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	38.990.479.212	35.554.104.804	91,19	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	48.617.040	33.317.000	68,53	100,00
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	195.999.600	100.417.100	51,23	100,00
	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	237.037.482.565	214.763.521.575	90,60	97,34
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.473.535.560	4.457.026.439	99,63	95,85
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.799.305	48.759.250	95,98	96,61
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	37.882.600	37.882.600	100,00	99,63

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.430.124.393	219.854.393	6,41	99,99
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.786.449.057	1.734.085.257	97,07	98,37
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.190.200	9.428.000	77,34	86,76
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	26.617.950	26.617.950	100,00	96,09
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	55.900.000	55.600.000	99,46	95,45
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	146.014.255	146.014.255	100,00	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	651.803.530	639.135.200	98,06	98,32
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.469.078.428	2.436.815.628	98,69	128,15
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.170.590	50.170.590	100,00	99,77

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	55.141.000	54.991.000	99,73	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.589.281.520	9.752.929.684	77,47	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	649.834.200	637.084.200	98,04	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.031.237.550	1.014.392.550	98,37	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	522.300.501	486.229.000	93,09	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	21.693.200	21.691.500	99,99	100,00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.091.966.855	1.056.314.194	96,74	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	366.900.000	345.900.000	94,28	91,15

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.720.409.400	3.577.195.500	96,15	100,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	166.747.137.600	154.136.714.104	92,44	100,00
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	195.605.000	157.402.000	80,47	100,00
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	171.683.530	171.683.530	100,00	100,00
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	567.359.400	276.263.200	48,69	100,00
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	11.111.658.214	9.771.662.563	87,94	100,00
	Operasional Pelayanan Puskesmas	13.527.080.016	12.673.828.397	93,69	100,00
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	966.710.786	721.127.313	74,60	100,00
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	8.160.000	8.160.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	21.576.000	21.576.000	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.012.983.493	875.119.829	86,39	100,00
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.582.831.080	2.507.012.500	97,06	42,36
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	23.447.000	5.300.000	22,60	29,99
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	9.000.000	0	0,00	42,00
	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	22.500.000	22.500.000	100,00	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.353.134.500	1.301.741.098	96,20	100,00
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	284.583.852	180.327.852	63,37	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	601.720.000	586.950.000	97,55	100,00
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	4.542.986.000	4.490.040.000	98,83	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	47.996.000	47.996.000	100,00	100,00
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	767.881.619	724.994.750	94,41	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	767.881.619	724.994.750	94,41	100,00
	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	819.417.912	745.718.254	91,01	96,15
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	798.686.900	724.987.242	90,77	100,00
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	20.731.012	20.731.012	100,00	100,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.777.678.950	2.557.790.548	92,08	109,09
	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	93.152.950	86.072.750	92,40	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	93.152.950	86.072.750	92,40	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.684.526.000	2.471.717.798	92,07	100,00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.684.526.000	2.471.717.798	92,07	100,00
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	486.094.000	394.391.042	81,13	109,09
	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	102.113.000	76.625.000	75,04	25,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	102.113.000	76.625.000	75,04	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	218.697.000	166.287.500	76,04	25,00
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	218.697.000	166.287.500	76,04	100,00
	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	165.284.000	151.478.542	91,65	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	165.284.000	151.478.542	91,65	100,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	777.516.900	734.110.900	94,42	109,09
	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	52.092.000	50.421.000	96,79	108,70
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	52.092.000	50.421.000	96,79	100,00
	<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	339.992.900	325.098.900	95,62	100,41
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	51.786.500	44.506.500	85,94	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	288.206.400	280.592.400	97,36	100,00
	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	385.432.000	358.591.000	93,04	100,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	385.432.000	358.591.000	93,04	100,00
Total Sasaran 1		322.804.310.318	292.566.783.811	90,63	109,09
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	381.673.862.937	317.072.147.030	83,07	100,30
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	254.467.952	233.193.200	91,64	100,89

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.504.200	89.389.600	99,87	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.469.206	31.427.000	99,87	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	34.063.506	34.017.000	99,86	150,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.209.850	25.145.000	99,74	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.046.050	29.972.600	99,76	150,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.175.140	23.242.000	52,61	100,00
Total Sasaran 2		254.467.952	233.193.200	91,64	100,89
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah					
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	381.673.862.937	317.072.147.030	83,07	100,30
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	289.680.549.882	235.014.745.863	81,13	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	288.270.490.982	233.737.388.763	81,08	9,44

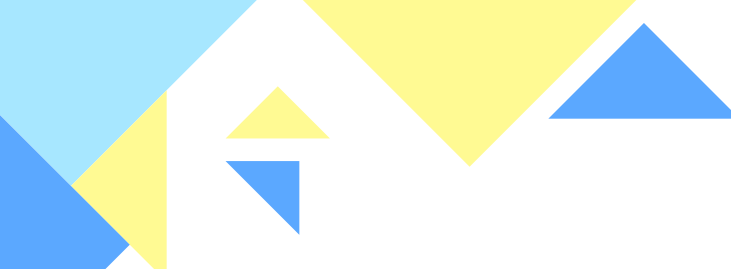
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	863.445.400	750.326.100	86,90	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	546.613.500	527.031.000	96,42	100,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	87.750.000	86.163.750	98,19	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.750.000	86.163.750	98,19	100,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.771.983.433	1.526.919.226	86,17	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	152.836.048	136.597.000	89,37	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.624.258	284.539.000	87,92	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.599.365	136.720.000	85,13	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.877.362	47.323.750	76,48	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.126.500	21.630.000	39,24	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.500.000	78.778.000	99,09	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.703.000	692.248.426	86,46	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	137.716.900	129.083.050	93,73	100,00
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	477.470.232	447.550.269	93,73	100,00
	Pengadaan Mebel	365.004.732	345.055.269	94,53	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.465.500	102.495.000	91,13	100,00
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	4.966.829.000	3.951.485.342	79,56	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.432.255.000	2.723.376.106	79,35	100,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.870.000	64.318.900	34,60	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.348.704.000	1.163.790.335	86,29	100,00
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	613.736.000	414.810.491	67,59	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Keuangan	% Capaian Kinerja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.312.000	271.850.491	59,71	39,08
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.424.000	142.960.000	90,24	100,00
	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	83.821.076.438	75.397.278.889	89,95	100,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	83.821.076.438	75.397.278.889	89,95	100,00
Total Sasaran 3		381.419.394.985	316.838.953.830	83,07	100,30

Sumber: Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa sub kegiatan sudah melebihi capaian 100% dari target yang ditetapkan. Beberapa subkegiatan belum mencapai realisasi kinerja sebesar 100 persen, namun sudah berada pada rerata capaian 97%. Kondisi ini terutama terjadi pada subkegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Subkegiatan tersebut pada dasarnya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan lainnya, karena pencapaiannya tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program oleh perangkat daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sasaran di masyarakat serta pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan serta barang/jasa yang telah ditetapkan.



Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yang diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah diuraikan secara komprehensif. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis, secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, dimana seluruh sasaran tersebut berhasil direalisasikan dengan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, pencapaian kinerja tersebut juga didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efektif, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Hal ini tercermin dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.


Melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah disajikan pada bab ini, diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program pembangunan kesehatan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan pentingnya penerapan manajemen kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2025, secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS), sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruhnya menunjukkan capaian



kinerja di atas target yang direncanakan, dengan tingkat capaian lebih dari 100 persen.

Selain capaian kinerja tahunan tersebut, perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di Dinas Kesehatan melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang lebih terarah, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Dari sisi pengelolaan sumber daya, keberhasilan pencapaian sasaran strategis juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dengan pemanfaatan anggaran yang efisien dan tetap terkendali.

Capaian kinerja yang diraih pada tahun 2025 tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi target indikator kinerja Dinas Kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan capaian Indeks Keluarga Sehat menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan indeks kepuasan masyarakat mencerminkan semakin baiknya tata kelola organisasi serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang akan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengembangan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Hasil capaian kinerja yang telah diperoleh pada tahun 2025 akan menjadi landasan dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dapat terus terwujud secara berkelanjutan.

Lubuk Pakam, 28 Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang



dr. Tetti Rossanti Keliat, M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19770418 200312 2 009